



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL
DI BINTAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

DELFA HERLINA

NIM. 500627997

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRAK

Sektor pariwisata memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sektor lain seperti migas, dan kekayaan alam lainnya. Kegiatan industri pariwisata merupakan sektor ekonomi yang melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat dapat menjadi penyokong utama dari kegiatan ini, sehingga dapat memberi keuntungan ekonomis bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pengembangan pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal di Bintan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di Bintan.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen, serta observasi. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Hasil penelitian adalah, kebijakan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Bintan dilakukan secara terencana oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kebijakan dilakukan sejak tahun 2008 dengan adanya keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang posisi Bintan sebagai salah satu wilayah prioritas untuk dikembangkan. Usaha pemerintah tersebut yaitu: melakukan perencanaan dan pelatihan kerja. Dampak dari pengelolaan pariwisata tersebut yaitu meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, melalui pemberdayaan masyarakat, membina masyarakat agar dapat memiliki ciri khas dan memelihara keasrian kawasan wisata dan memperkenalkan produk buatan tangan masyarakat Bintan sendiri. Faktor penghambat dari pengelolaan kawasan wisata Kabupaten Bintan yaitu anggaran dana belum mencukupi. Faktor pendukung dalam mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Bintan yaitu dukungan masyarakat untuk menjadikan kawasan wisata yang mampu bersaing dengan kawasan wisata lainnya, bekerja sama dalam membangun infrastruktur dan akomodasi.

Kata Kunci: Pengelolaan Pariwisata, Ekonomi Masyarakat, Kabupaten Bintan.

ABSTRACT

The tourism sector has many advantages if compared with other sectors such as oil and gas, and other natural wealth. Tourism industry activity is an economic sector that involves many parties, especially the community can become the main supporter of this activity, so it can provide economic benefits for the local community. This study aims to analyze the impact of tourism development policy on the local community economy in Bintan and analyze the supporting factors and obstacles of tourism development policy as an effort to increase the income of local people in Bintan.

Research conducted by this researcher use descriptive qualitative approach with case study approach. The type of data used in this study is primary data and secondary data. The data collection techniques in this study are interviews and documents, and observation. Data analysis is the process of organizing and sorting data into patterns, categories and units of basic descriptions so that it can be found the theme and can be formulated working hypothesis.

The result of research is, policy of tourism area development in Regency of Bintan done by planned by Department of Culture and Tourism. The policy was carried out since 2008 with the Riau Islands Governor's decision on the position of Bintan as one of the priority areas to be developed. Government efforts are: doing the planning and job training. The impact of the tourism management is to improve living standards and increase employment opportunities for the surrounding community, through community empowerment, fostering the community in order to have the characteristic and maintain the beauty of the tourist area and introduce the handmade products of the people of Bintan itself. The inhibiting factor from the management of the tourist area of Bintan Regency is the insufficient budget. Supporting factors in developing tourist area in Bintan regency is community support to make tourism area that can compete with other tourism area, work together in building infrastructure and accommodation.

Keywords: Tourism Management, Community Economy, Kabupaten Bintan.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul " **Dampak Pengembangan Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal di Bintan** " adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjungpinang,
Yang Menyatakan



DELFA HERLINA
NIM. 500627997

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Pengyusun TAPM : Delfia Herlina
NIM : 500627997
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Dampak Pengembangan Pariwisata Sebagai Upaya
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal di Bintan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka
pada :

Hari / Tanggal : SABTU, 28 APRIL 2018

Waktu : 14.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Eliaki Gulo, MM

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, M.A

Pembimbing I
Nama : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A

Pembimbing II
Nama : Dr. Heri Wahyudi, S.Sos, M.Si

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

(TAPM)

Judul TAPM : Dampak Pengembangan Pariwisata Sebagai
Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Lokal di Bintan

Penyusun TAPM : Delfia Herlina

NIM : 500627997

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing I



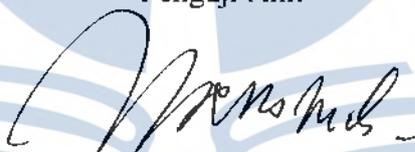
Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A.
NIP. 19720710 198803 2 001

Pembimbing II



Dr. Heri Wahyudi, S.Sos, M.Si
NIP. 19710511 200604 1 002

Penguji Ahli



Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, M.A.
NIP. 19470401 196805 1 001

Mengetahui :

Ketua Pasca Sarjana
Hukum Sosial, dan Politik



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

RIWAYAT HIDUP

Nama : Delfia Herlina
NIM : 500627997
Progrm Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 11 Juli 1986

Riwayat Pendidikan : Lulus SD Negeri 027 di Tanjungpinang pada tahun 1998
Lulus SMP N 1 di Tanjungpinang pada tahun 2001
Lulus SMA Negeri 2 di Tanjungpinang pada tahun 2004
Lulus S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Bung Hatta pada tahun 2008

Riwayat pekerjaan : Tahun 2009 s/d sekarang sebagai PNS di Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, Juli 2018

DELFINA HERLINA
NIM 500627997

Kata Pengantar

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, yang telah memberikan segala kekuatan, kemampuan, dan kelancaran kepada penulis untuk melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul “**Dampak Pengembangan Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal di Bintan**”. Maksud dan tujuan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh program magister. Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D selaku Dekan FHSIP Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik Universitas Terbuka .
3. Bapak Eliaki Gulo, SE., MM selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Batam.
4. Ibu Dr. Nurliah Nurdin, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak

membantu dengan kritik dan sarannya dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini sekaligus memberikan motivasi yang cukup besar kepada penulis.

5. Bapak Dr. Heri Wahyudi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dengan kritik dan sarannya dalam penyelesaian tugas akhir Program Magister (TAPM) ini sekaligus memberikan motivasi yang cukup besar kepada penulis.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu yang dimiliki dari hal yang tidak diketahui menjadi tahu selama beliau-beliau memberikan ilmunya dalam proses belajar-mengajar di kampus Universitas Terbuka Batam.
7. Staf administrasi di kampus Universitas Terbuka Batam yang selama ini telah membantu penulis dalam hal surat-menyurat untuk keperluan penulis selama ini.
8. Rasa terima kasih yang tidak terhingga penulis berikan kepada Keluarga, Ayahanda (Drs.H. Dalmasri Syam, MM) dan Ibunda tercinta (Hj. Herdawati, S.Pd), yang telah membesarkan dan memberikan bimbingan dan do'a yang tiada henti untuk penulis, dan suami tersayang serta kepada ketiga Adik kandung yang telah banyak memberi motivasi dan dukungannya.
9. Kemudian untuk seluruh teman-teman seperjuangan Program Pasca sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Terbuka Batam Angkatan 2015.2 yang selalu memberi dukungan terbesar dalam menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dan secara keseluruhan semuanya telah memberikan motivasi dan semangat yang berlipat ganda kepada penulis.

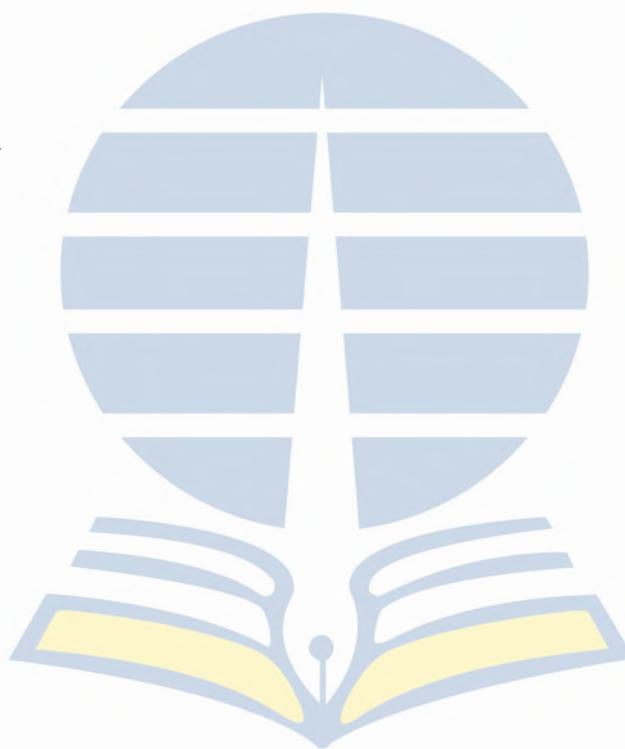
Akhir kata peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb

Batam, 2018

Penulis

Delfia Herlina



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Abstract	ii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Lembar Layak Uji.....	iv
Lembar Pengesahan TAPM.....	v
Lembar Persetujuan	vi
Riwayat Hidup	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
 BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Kajian Teori	12
B. Penelitian Terdahulu yang relevan.....	32
C. Kerangka Berpikir	36
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian	41
3.3 Informan Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Analisis Data	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
B. Pembahasan	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui rekayasa pembagaaian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu yang menjadi point penting dari kebijakan tersebut adalah adanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengimprovisasi kebijakan-kebijakan di daerah yang dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat lokal.

Salah satu sumber pemasukan potensial bagi pemerintah daerah adalah pengemhangan sektor pariwisata. Guna memberikan payung hukum atas pengelolaan sektor pariwisata, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai kekayaan alam kaitannya dengan pemanfaatan pariwisata sebagai sumber daya dan modal pembangunan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Langkah pemerintah Pusat untuk mendorong pembangunan sektor pariwisata disambut oleh pemerintah daerah. Banyak daerah yang berlomba-lomba memajukan pembangunan sektor pariwisata. Banyak pemerintah daerah yang mulai mengembangkan sektor pariwisata dibandingkan dengan sektor-

sektor yang lainnya. Sektor pariwisata memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sector lain seperti migas, dan kekayaan alam lainnya. Kegiatan industri pariwisata merupakan sektor ekonomi yang melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat dapat menjadi penyokong utama dari kegiatan ini, sehingga dapat memberi keuntungan ekonomis bagi masyarakat lokal.

Kelebihan industri pariwisata dibandingkan dengan industri di bidang lain yaitu karena secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Oleh karena itu, industri pariwisata disebut memiliki energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami *metamorphose* dalam berbagai aspeknya.

Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau, menjadi daya tarik tersendiri sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Oleh karena itu, sejak tahun 2008 pemerintah Indonesia terus menggenjot industri pariwisata dengan berbagai promosi ke luar negeri. Pada tahun 2013,

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 8.637.275 wisman dengan pertumbuhan sebesar 7,37%, dibandingkan tahun 2012 sebanyak 8,04 juta wisatawan asing.

Tingginya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia berdampak langsung pada penerimaan PDB dari pariwisata pada tahun 2013 mencapai Rp347,35 triliun, serta kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB yang mencapai Rp641, 82 triliun. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif tercatat sebanyak 11,87 juta orang (10,72%).

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994 :14).

Potensi sektor pariwisata sebagai salah satu sector unggulan untuk dikembangkan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya

tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Selanjutnya wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1994 : 20).

Sejalan dengan hal tersebut dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dikelompokan oleh Cohen (1984) menjadi delapan kelompok besar, yaitu (1) dampak terhadap penerimaan devisa, (2) dampak terhadap pendapatan masyarakat, (3) dampak terhadap kesempatan kerja, (4) dampak terhadap harga-harga, (5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan, (6) dampak terhadap kepemilikan dan control, (7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan (8) dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Kemajuan industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan

pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar.

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tekad untuk mendatangkan turis domestik dan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut terlihat dari tekad pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mendayagunakan kehumasan dan promosi daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Termasuk sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah sumber daya keindahan alam yang dimiliki oleh wilayah ini.

Tekad pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memajukan industri pariwisata tersebut tidak disertai dengan perencanaan jangka panjang dalam pembangunan pariwisata. Padahal sebagaimana disebutkan oleh Fandeli (1995), bahwa dalam membangun industri pariwisata haruslah direncanakan secara matang. Dalam perencanaan pariwisata harus melihat kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang.

Secara khusus, peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bintan. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Bintan disebabkan karena Bintan

sejak tahun 2007 ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang biasa disebut FTZ (Free Trade Zone) berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2007. Selain itu, Bintan juga terletak di Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan dunia yang sangat ramai sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan GDP Nasional.

Kabupaten Bintan sebagai wilayah prioritas di dalam kebijakan ini memiliki objek wisata bahari yang tersebar di pesisir utara Pulau Bintan. Pengembangan subsektor pariwisata diprioritaskan di pesisir utara Pulau Bintan, dengan dibangunnya infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang yang dapat memperlancar aksesibilitas ke obyek wisata.

Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan sangat tergantung dari sektor pariwisata. Pada tahun 2012 hingga 2013 diperkirakan lebih dari 50% sumbangan Pendapatan Asli Daerah Bintan berasal dari kawasan wisata Lagoi ini. sedang PAD dari sektor sektor pertambangan, pertanian, industri dan kelautan masih berada di urutan di bawah pendapatan dari sektor pariwisata seperti ditunjukkan pada table berikut.

TABEL 1.1

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2010	119.808.991.100	130.846.899.926,84
2011	121.436.408.714	136.232.925.611,22
2012	130.138.946.500	136.274.546.432,36

2013	134.088.654.257	136.077.603.306,04
2014	158.959.953.600	164.959.953.254
2015	162.440.556.345	167.210.322.102

Sumber: RPJMD, Kabupaten Bintan tahun 2016

Jika dilihat dari table di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi lonjakan PAD terhadap kas pemerintah daerah Kabupaten Bintan antara sebelum dan sesudah pembangunan industri pariwisata di wilayah tersebut. Hal tersebut ditopang oleh kemajuan industry pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah. Besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan serta sumbangsuhnya terhadap PAD, tidak sebanding dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah.

Tingginya pendapatan daerah dari sektor pariwisata bagi pemerintah, tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya perencanaan yang matang dari pemerintah dalam membangun sector pariwisata yang berkelanjutan yang melibatkan masyarakat. Hasil kajian sementara, pemerintah tidak memiliki perencanaan yang jelas terkait dengan proyek pariwisata Kabupaten Bintan secara umum; Kedua, pemerintah tidak memberikan ruang yang luas terhadap keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari industri pariwisata; Ketiga, pembangunan pariwisata belum mengikut sertakan masyarakat sebagai unsur pendukung utama; Keempat, Pembangunan pariwisata belum menjadi sector ekonomi unggulan bagi masyarakat; Kelima, pelibatan sector swasta di dalam pengelolaan masih minim; Keenam, Pembangunan pariwisata belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kabupaten Bintan; Ketujuh,

belum ada koordinasi yang baik antara Kabupaten dengan Pemda Kepri dalam kawasan kawasan ecowisata yang berbasis masyarakat; Kedelapan, Pembangunan pariwisata belum melibatkan semua unsur lapisan pemerintahan.

Selain itu, pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan kawasan wisata berskala internasional di daerah tersebut dilarang bertransaksi dengan menggunakan uang dollar. Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Luki Z Prawira mengatakan Bupati Bintan juga telah mengeluarkan surat edaran agar pengusaha perhotelan dan restoran serta pedagang di kawasan wisata internasional tidak menerima uang dollar dari wisatawan sebagai alat pembayaran (lihat dalam <http://travel.kompas.com/read/2015/01/19/131900327/Di.Bintan.Kawasan.Wisata.Dilarang.Gunakan.Dollar>, diakses pada 12 Oktober 2017, pukul 21.00 WIB).

Pelarangan tersebut dimulai sejak UU Mata Uang diberlakukan. Menurut Luki, pihaknya langsung menyosialisasikan kepada pengelola hotel di kawasan wisata internasional Lagoi dan kawasan lainnya. Sosialisasi juga dilakukan kepada pedagang di sekitar kawasan wisata. Kebijakan tersebut menyulitkan bagi wisatawan untuk bertransaksi menggunakan mata uang asal mereka

(<http://travel.kompas.com/read/2015/01/19/131900327/Di.Bintan.Kawasan.Wisata.Dilarang.Gunakan.Dollar>, diakses pada 12 Oktober 2017, pukul 21.00 WIB).

Permasalahan lain yang melingkupi permasalahan dalam pengelolaan Bintan sebagai destinasi wisata yaitu terkait dengan pembebasan lahan di Kawasan Lagoi yang dulu merupakan tanah hak milik rakyat. Harga ganti rugi yang tidak sesuai membuat masalah ini berlarut-larut sampai sekarang. Selain itu Pemerintah sendiri tidak ada langkah penyelesaian. Untuk data warga yang masih belum diganti rugi juga tidak ada data yang jelas.

Pengelolaan pariwisata oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam beberapa hal terganjal oleh berbagai permasalahan, oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah menggandeng Singapura. Pemerintah Singapura yang menghadapi masalah kejenuhan wisatawan karena dihadapkan pada objek yang sama, sementara Singapura tidak memiliki cukup sumber daya alam untuk ditawarkan kepada wisatawan yang datang ke Singapura. Melihat keunggulan diatas dan dilandasi oleh pengertian saling menguntungkan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura maka dicapai satu kesepakatan untuk bersamasama mengembangkan kawasan Wisata Lagoi, di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai dampak pengembangan pariwisata yang dirumuskan oleh pemerintah memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal; dan apa saja yang mendukung dan menghambat pengembangan pariwisata tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana dampak kebijakan pengembangan pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal di Bintan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di Bintan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis dampak kebijakan pengembangan pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal di Bintan.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di Bintan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tentang kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di Bintan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang pengembangan pariwisata kaitannya dengan ekonomi warga.
 - b. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan pariwisata guna meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di daerah penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pengembangan bidang pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat local di Bintan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan pada Dinas terkait dalam untuk membuat kebijakan strategis dan memiliki efek terhadap ekonomi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa teori yang digunakan yaitu teori pengembangan ekonomi lokal. Teori ini berguna untuk melihat narasi pembangunan sektor pariwisata yang mulai marak dilakukan akhir-akhir ini oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, akan dibahas tentang konsep pariwisata yang meliputi pengertian-pengertian pariwisata, kontribusi Kegiatan Kepariwisataan terhadap Pendapatan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, Teori Dampak Industri Kepariwisataan, dan Teori Dampak Perkembangan Pariwisata. Peneliti juga menjelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terakhir adalah kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dan alur dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teori Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal merupakan bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengertian mengenai pengembangan ekonomi lokal di antaranya dikemukakan oleh

Blakely dan Bradshaw yaitu proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Pengembangan ekonomi lokal dengan demikian merupakan suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru. Sedangkan menurut World Bank (dikutip dalam Nurzaman, 2002:34), pengembangan ekonomi lokal yaitu proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Pengembangan ekonomi lokal tidak terlepas dari sepak terjang pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam mengembangkan ekonomi lokal. Sebagai entitas yang memiliki otoritas, Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Peranan pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal memperhatikan infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan industri, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Selain pemerintah daerah, pengembangan ekonomi lokal juga tidak terlepas dari peranan swasta dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini swasta dan kelompok masyarakat juga diperlukan dalam kegiatan

manajemen wilayah dan pencarian solusi atas permasalahan tertentu. Sementara itu, salah satu kebijaksanaan pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif, salah satunya melalui pengembangan potensi ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008:234).

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2002:68) sebagai berikut:

“kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.”

Menurut Sumihardjo (2008:67), bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD). RPJPD dan RPJMD merupakan dokumen yang berisi tentang keinginan pemerintah sebagai institusi otoritatif untuk pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah (jangka panjang dan menengah).

Pada era otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi lokal guna memperkuat daya saing daerah. Menurut Muktianto (dalam Sumiharjo, 2008:12) bahwa pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan. PDRB menjadi indikator

untuk mengetahui potensi basis dan non basis. Suatu daerah yang memiliki keunggulan memberikan kekhasan tersendiri yang tidak ada pada daerah lain, sehingga sektor unggulan tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan basis.

Sementara itu, menurut Tarigan (2007:55), bahwa teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak mengekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri.

Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (*primer mover rule*), sedangkan setiap perubahan mempunyai "efek multiplier" terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan

basis antara lain menggunakan metode analisis "*location quotient*" (LQ). (Triuwono & Yustika, 2003:93).

Apabila telah diketahui kegiatan basis di suatu daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, maka dapat menguatkan daya saing daerah tersebut. Menurut Abdullah (2002:12) sebagai berikut:

"daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional."

Indikator-indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah. Prinsip-prinsip kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah yakni :

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka pendek.
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik (dalam Hermayanti (2013).

Teori pengembangan ekonomi local digunakan untuk melihat narasi pembangunan sektor pariwisata yang mulai marak dilakukan akhir-

akhir ini oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan ekonomi lokal tidak terlepas dari sepaik terjang pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam mengembangkan ekonomi lokal. Sebagai entitas yang memiliki otoritas, Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Pemerintah daerah sebagai lokomotif dari tiga segitiga kekuatan dalam membangun daerah selain swasta dan kelompok masyarakat. Pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat diperlukan dalam kegiatan manajemen wilayah dan pencarian solusi atas permasalahan tertentu. Dengan demikian, membahas sector pariwisata, maka tidak dapat dilepaskan dari agenda pengembangan ekonomi lokal yang menjadi tugas pemerintah daerah untuk memajukan perekonomian masyarakat di daerah.

2. Konsep Pariwisata

a. Pengertian pariwisata

Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan, disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Konsep Pariwisata. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan

dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

b. Kontribusi Kegiatan Kepariwisata terhadap Pendapatan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli daerah, yaitu (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (b) dana perimbangan, (c) pinjaman daerah, (d) lain-lain pendapatan daerah yang asli. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Menurut Soekadijo (2000) wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya. Mereka yang dianggap sebagai wisatawan

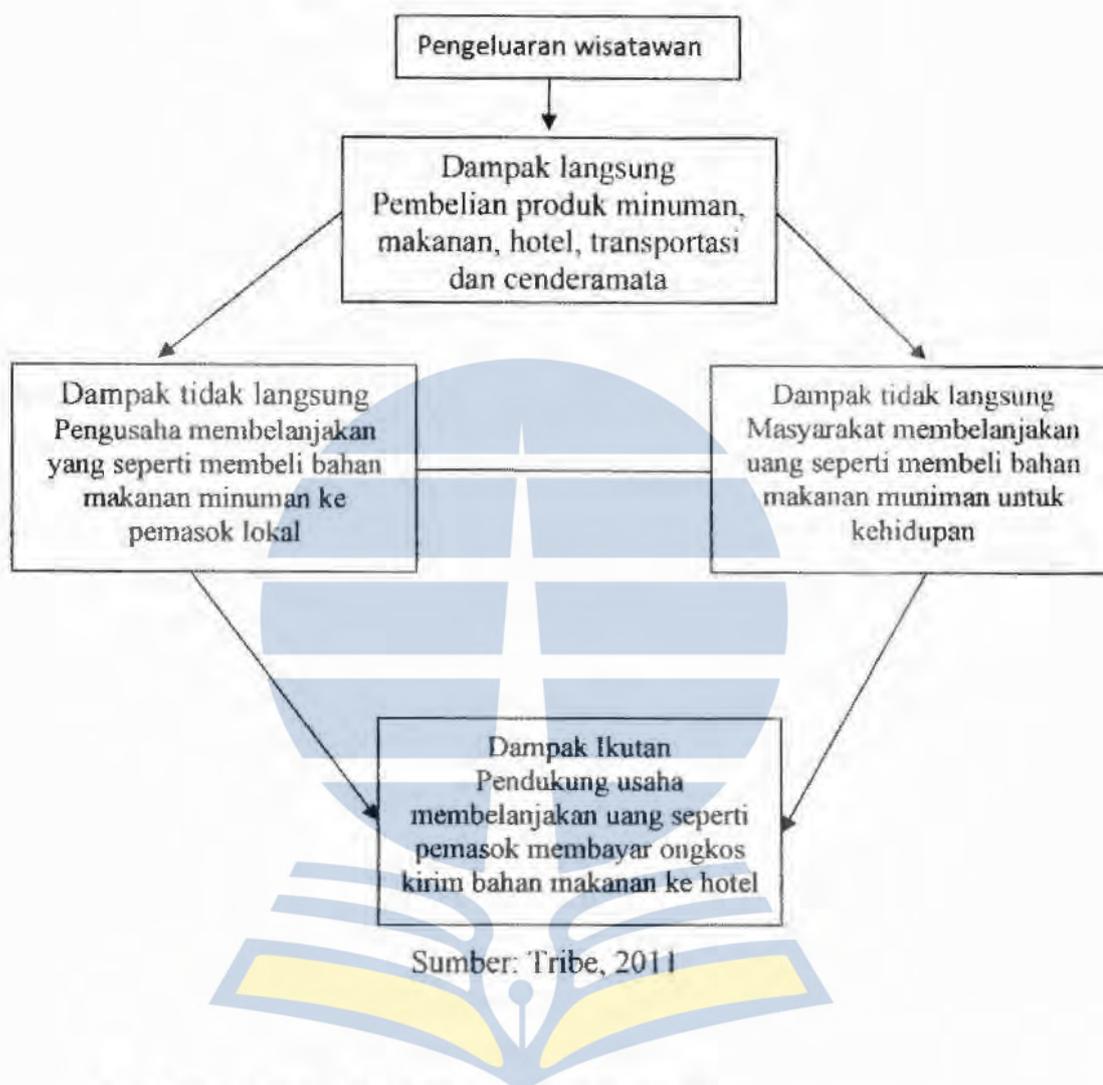
adalah orang yang melakukan kesenangan, karena alasan kesehatan dan sebagainya: orang yang melakukan perjalanan untuk pertemuan-pertemuan atau dalam kapasitasnya sebagai perwakilan (ilmu pengetahuan, administrasi, diplomatik, keagamaan, atlit dan alasan bisnis) (Foster, D 1987, dalam Sukarsa 1999).

Secara teoritis dalam Austriana (2005) semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah juga akan semakin meningkat.

Secara sederhana konsumsi sektor pariwisata merupakan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) selama tinggal di Daerah Tujuan Wisata yang dikunjunginya mulai dari paket perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, rekreasi budaya dan olahraga, belanja, dan lain-lain.

Mengenai dampak multiplier pariwisata ini, dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Dampak Multiplier Industri Pariwisata



c. Teori Dampak Industri Kepariwisata

Pariwisata menjadi salah satu fenomena saat ini. Kegiatan pariwisata disebut menjadi fenomena yang komposit dan memberikan pengaruh karena adanya hubungan karakteristik wisatawan dengan karakteristik destinasi. Menurut Mathession and Wall (dalam Ismayanti, 2010;182), pengaruh pariwisata dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Ada serangkaian variabel yang berhubungan dengan cara bagaimana ia mempengaruhi sifat, arah dan besaran dampak pariwisata.
- 2) Memberikan dampak secara perlahan dan berinteraksi antar sesama variabel.
- 3) Beroperasi secara berkelanjutan, yang berubah-ubah seiring dengan waktu dan seiring dengan permintaan wisata serta perubahan struktur dalam industri pariwisata.
- 4) Merupakan hasil dari proses yang rumit dalam hubungan antar wisatawan, tuan rumah, dan lingkungan di destinasi wisata.
- 5) Penilaian dampak harus meliputi seluruh tahap pengalaman berwisata mulai dari persiapan, perjalanan, selama berkunjung dan setelah perjalanan.

Dampak pariwisata merupakan studi yang paling sering mendapat perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah dampak terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan (Ismayanti, 2010:183).

Sementara menurut Lickorish dan Jenkins (1997:63), dampak utama pariwisata terhadap perekonomian terkait dengan pendapatan devisa, sumbangan untuk penerimaan pemerintah kesempatan kerja baru dan income untuk menstimulasi pembangunan daerah.

1) Dampak Ekonomi Positif

Dilihat dari kaca mata ekonomi makro, jelas pariwisata memberikan dampak positif, karena sebagai suatu industri (Yoeti, 2008;20) :

- a) Dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan datangnya para wisatawan, perlu pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dan harapan (*expectation*) wisatawan yang terdiri dari berbagai kebangsaan dan tingkah lakunya.
- b) Dapat meningkatkan kesempatan kerja (*employements*). Bayangkan saja, bila sebuah hotel dibangun dengan kamar sebanyak 400 kamar, paling sedikit diperlukan karyawan sebanyak 600 orang dengan ratio 1:1,5.
- c) Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai akibat *multiplier effect* yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar.
- d) Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Seperti kita ketahui tiap wisatawan berbelanja selalu dikenakan pajak sebesar 10 persen sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- e) Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Bruto* (GDB),

- f) Dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.
- g) Dapat memperkuat neraca pembayaran. Bila neraca pariwisata mengalami surplus, dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, dan sebaliknya.

2) Dampak Ekonomi Negatif

Selain itu, kegiatan pariwisata juga memiliki dampak negatif. Sejahter pengembangan pariwisata di Indonesia yang menerima kedatangan wisatawan silih berganti, dari sudut sosiologi belum banyak dilakukan penelitian tentang dampak negatif sebagai akibat pengembangan pariwisata secara tidak terkendali.

Kegiatan pariwisata yang berdampak negatif dapat dilihat dari beberapa contoh kejadian tersebut, misalnya (Yoeti, 2008;21):

- a) Harga tanah menjadi mahal, pantai-pantai dikaveling, sehingga sering terjadi spekulasi harga yang pada akhirnya meningkatkan harga tanah disekitarnya.
- b) Di pusat-pusat konsentrasi kegiatan pariwisata harga-harga bahan makanan menjadi mahal yang dapat meningkatkan inflasi tiap tahunnya.
- c) Sumber-sumber hayati menjadi rusak, yang menyebabkan Indonesia kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang.
- d) Terjadi urbanisasi, pencari kerja mengalir dari desa ke kota-kota besar.

- e) Ramainya lalu-lintas wisatawan, ternyata ditumpangi oleh penyelunduan obat bius dan narkotika.

Berdasarkan uraian teori di atas, dalam penelitian ini, penulis bermaksud membahas dampak pariwisata terhadap ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Menurut Yoeti (2008:27) sektor pariwisata secara umum berdampak pada sector-sector lain yang saling mendukung satu sama lain. Beberapa dampak industri pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kerja perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata, sehingga memungkinkan orang-orang melakukan aktivitas ekonominya dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu wilayah negara tertentu, maupun dalam kawasan internasional sekali pun.
- b) Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata seperti misalnya: *Transpotation, Accomodation (Hotel, Motel, holiday Village, Camping Sites, dan lain-lain.)* yang juga akhirnya menciptakan permintaan baru seperti: *Tourist Transportation, Hotel Equipment (Lift, Escalator, China ware, Linens, Furnitures, dan lain-lain)*
- c) Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran, seperti sayur, buah-buahan, bunga, telur,

- daging, dan lain-lain karena semakin banyaknya orang-orang melakukan perjalanan wisata.
- d) Meningkatkan permintaan terhadap: *Handicraft, Souvenir Goods, Art Painting*, dan lain-lain.
 - e) Memperluas barang-barang lokal untuk lebih dikenal oleh dunia internasional termasuk makanan dan minuman, seperti: Ukiran Jepara, Patung Bali, Keramik Kasongan Yogyakarta, Batik Pekalongan, Sulaman Tasikmalaya, Dodol Garut, Kerajinan Pandai Sikek, atau Sate Madura dan lain-lain.
 - f) Meningkatkan perolehan devisa negara, sehingga dapat mengurangi beban defisit neraca pembayaran.
 - g) Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional.
 - h) Membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan.
 - i) Mempercepat perputaran perekonomian pada negara-negara penerima kunjungan wisata. (*Tourist Receiving Countries*)
 - j) Dampak penggandaan (*multiplier effect*) yang ditimbulkan pengeluaran wisatawan, sehingga memberi dampak positif bagi pertumbuhan daerah tujuan wisata (DTW) yang dikunjungi wisatawan.

Berdasarkan pembahasan di atas, sektor pariwisata merupakan sector industry basis yang dapat mempengaruhi berkembangnya sektor lain di suatu wilayah tersebut. Pembangunan industri pariwisata memiliki multiple effect bagi industri lainnya.

Selain dampak pariwisata terhadap ekonomi sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan pariwisata juga dapat berdampak multiplier. Dampak multiplier dari pengeluaran wisatawan mengacu pada income, ketenagakerjaan, dan pendapatan pemerintah dari belanja wisatawan. Hal ini dapat dikategorikan dalam lima tipe, yaitu (Lickorish dan Jenkins, 1997:63):

- a) *Transactions or sales multipliers*. Peningkatan belanja wisatawan dapat meningkatkan pendapatan usaha.
- b) *Output Multipliers*. Peningkatan belanja wisatawan berdampak pada peningkatan jumlah output yang diproduksi.
- c) *Income Multipliers*. Peningkatan belanja wisatawan berdampak pada perhitungan tambahan pendapatan dalam perekonomian.
- d) *Government Revenue Multiplier*. Peningkatan belanja wisatawan berdampak pada perhitungan pendapatan pemerintah.
- e) *Employment Multiplier*. Peningkatan belanja wisatawan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja baru. Keunikan industri pariwisata terhadap perekonomian berupa dampak penggandaan (*multiplier effect*) dari pariwisata terhadap ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian bahwa pariwisata memberikan pengaruh memberikan dampak langsung terhadap sektor ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan kegiatan pariwisata tersebut, penghasilan masyarakat sekitar maupun masyarakat yang berjualan di lokasi pariwisata menjadi meningkat.

d. Teori Dampak Perkembangan Pariwisata

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Berdasarkan dampak pembangunan dan pariwisata, maka pada prinsipnya Erawan (1987:47 dalam Tashadi, Ed., 1994) membagi menjadi 3 bidang pokok yang dipengaruhi pariwisata 35 yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sementara itu, Pitana dan Gayatri (2005:109) memperkuat dengan menyatakan bahwa pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat membawa berbagai dampak. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata, yaitu: dampak terhadap sosial ekonomi, dampak terhadap sosial budaya dan dampak terhadap lingkungan fisik.

Dampak pariwisata adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap lingkungan hidup sebelum adanya kegiatan pariwisata dan

setelah adanya kegiatan pariwisata baik langsung maupun tidak langsung yang berupa dampak fisik dan non fisik. Adapun masyarakat sebagai salah satu komponen lingkungan hidup juga mengalami perubahan-perubahan. Dampak non fisik terhadap masyarakat yang ditimbulkan yaitu perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemudian dampak fisik terhadap masyarakat yang terjadi yaitu perubahan lingkungan fisik dan fungsi permukiman.

Secara ekonomi, dampak pariwisata adalah pengaruh suatu aktivitas/kegiatan terhadap kondisi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan serta produktifitas masyarakat (Sujarto 1993:135). Adanya pariwisata mendatangkan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja yang berarti mengurangi jumlah pengangguran serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka (De 36 Kadl, 1979:11 dalam Tashadi, Ed., 1994).

Secara lebih rinci Cohen (1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 110) mengategorikan dampak sosial ekonomi pariwisata terhadap masyarakat kedalam delapan kelompok besar, yaitu: (1) dampak terhadap penerimaan devisa, (2) dampak terhadap pendapatan masyarakat, (3) dampak terhadap kesempatan kerja, (4) dampak terhadap harga-harga, (5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan, (6) dampak terhadap kepemilikan dan control, (7)

dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan (8) dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Adapun dampak terhadap kesempatan kerja diindikasikan dari munculnya sumber-sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat (Suratmo, 2007). Kemudian dampak terhadap harga-harga seperti dinyatakan Sari (2004: 80), bahwa pariwisata berdampak terhadap kenaikan inflasi dan harga lahan. Kenaikan inflasi disebabkan para penduduk menawarkan dan menjual barang-barang kepada wisatawan dengan harga mahal. Kemudian minat investor untuk menguasai lahan-lahan di daerah tujuan wisata telah mememicu kenaikan harga lahan.

Selain dampak ekonomi, pariwisata juga membawa dampak sosial. Menurut Kuntowijoyo (1991), keberadaan industri pariwisata sebenarnya merupakan bagian dari *cultural industry* yang melibatkan seluruh masyarakat, sekalipun dikelola hanya oleh sebagian kecil masyarakat. Meskipun hanya sebagian masyarakat yang terlibat, namun dampak sosial pariwisata lebih luas seperti dinyatakan Cohen (1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 117), secara teoritis dapat dikelompokkan kedalam sepuluh kelompok besar dampak sosial budaya pariwisata.

Salah satu diantara dampak sosial pariwisata yaitu dampak terhadap tingkat otonomi atau ketergantungan pada pariwisata. Kemudian Martin (1998:171 dalam Pitana dan Gayatri, 2005:115)

menyatakan dampak sosial pariwisata selama ini lebih cenderung mengasumsikan bahwa akan terjadi perubahan sosial akibat kedatangan wisatawan. Pariwisata berdampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial (Cohen, 1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 117) dengan terjadinya ketimpangan/kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Wiranatha (2008) bahwa dampak pariwisata terhadap masyarakat termasuk terjadinya kesenjangan pendapatan/kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung. Begitu juga kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata memunculkan aktivitas ekonomi yang menjadi faktor daya tarik penduduk yang menurut Cohen (1984 dalam Pitana dan Gayatri, 2005: 117) berdampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata.

Dalam memajukan industri pariwisata, penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cinderamata yang memiliki kekhasan dari obyek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di obyek wisata tersebut.

Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial.

Secara umum, dampak industri pariwisata terhadap masyarakat menurut Wiranatha (2008) adalah membuka lapangan pekerjaan, pariwisata juga berdampak positif terhadap peningkatan infrastruktur/fasilitas umum di daerah tujuan wisata. Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat yaitu terjadinya kesenjangan pendapatan/kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung. Ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata juga merupakan dampak negatif (Sari 2004: 79) karena mata pencaharian 40 penduduk menjadi sangat tergantung pada kunjungan wisatawan. Hal ini mengingat pariwisata sangat rentan terhadap perubahan dari dalam seperti kerusakan politik di daerah tujuan wisata dan perubahan dari luar seperti krisis ekonomi global. Kemudian migrasi juga dampak negatif pariwisata karena masuknya pendatang bekerja di sektor pariwisata menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah Wiranatha (2008).

Berdasarkan teori di atas, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan Cohen yang mengatakan ada

delapan dampak industri pariwisata yaitu: 1) dampak terhadap penerimaan devisa, 2) dampak terhadap pendapatan masyarakat, 3) dampak terhadap kesempatan kerja, 4) dampak terhadap harga-harga, 5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan, 6) dampak terhadap kepemilikan dan control, 7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan 8) dampak terhadap pendapatan pemerintah. Teori ini digunakan karena lebih lengkap dalam memotret dampak pariwisata terhadap ekonomi suatu daerah.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai bahan telaah dalam penelitian ini seperti tertuang pada penjelasan dibawah ini :

1. Penelitian Heni Ari Putranti (2002) dengan judul “Dampak Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Lagoi Oleh Investor Asing Terhadap Masyarakat Setempat Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau” Tugas Akhir Undip Semarang. RUMusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pegelolaan kawasan wisata Pantai Lagoi oleh investor asing terhadap masyarakat setempat (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan) dan terhadap pemerintah daerah dalam hal ini PAD Kabupaten Kepulauan Riau.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Delphi dengan pertimbangan keterbatasan data, waktu, biaya dan lokasi penelitian yang cukup jauh. Metode Delphi dilakukan dalam 4 (empat) tahapan.

Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan pengelolaan kawasan wisata Pantai Lagoi menyebabkan terjadinya dampak positif dan negatif yang berimbang. Dampak positif terutama terhadap PAD karena terbukti merupakan sumber utama selama 5(lima) tahun terakhir dengan kontribusi diatas 60% bahkan pernah mencapai 81% pada tahun 2000. Selain itu dampak positif terhadap fisik lingkungan berupa peningkatan kualitas lingkungan serta dapat menghalangi terjadinya degradasi lingkungan akibat penambangan pasir laut. Dampak negatif terutama dirasakan pada sektor ekonomi, dimana proses multiplier tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya eksklusivitas kawasan. Selain itu juga dirasakan pada aspek sosial budaya masyarakat setempat. Dimana yang utama adalah tersingkirnya masyarakat karena kualitas SDM lokal tidak mampu bersaing dengan pendatang yang memiliki skill yang lebih tinggi.

2. Jurnal Lilian Sarah dan Wildom Sahusilawance dengan judul "Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Pantai Natsepa, Pulau Ambon". Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pendapatan kelompok rumah tangga yaitu, jumlah anggota keluarga, tingkat pengeluaran, dan curahan waktu kerja. Berdasarkan tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang yaitu

persentase sebesar 75%, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dengan persentase sebesar 22% dan yang terkecil yaitu tingkat kesejahteraan rendah dengan persentase sebesar 3%.

Tabel. 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan di lakukan

NO	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Bagaimana dampak Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Lagoi Oleh Investor Asing Terhadap Masyarakat Setempat Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau”</p> <p>(Heni Ari Putranti, 2002)</p>	<p>kebijakan pengelolaan kawasan wisata Pantai Lagoi menyebabkan terjadinya dampak positif dan negatif yang berimbang. Dampak positif terutama terhadap PAD karena terbukti merupakan sumber utama selama 5 (lima) tahun terakhir dengan kontribusi diatas 60% bahkan pernah mencapai 81% pada tahun 2000. Selain itu dampak positif terhadap fisik lingkungan berupa peningkatan kualitas lingkungan serta dapat menghalangi terjadinya degradasi lingkungan akibat penambangan pasir laut. Dampak negatif terutama dirasakan pada sektor ekonomi, dimana proses multiplier tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya eksklusivitas kawasan. Selain itu juga dirasakan pada aspek sosial budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat persamaan baik dalam tema penelitian yaitu kontribusi pariwisata terhadap ekonomi warga 2. Terdapat persamaan dalam metodologi penelitian yaitu penelitian Kualitatif deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian. 2. Penelitian yang akan dilakukan lebih fokus terhadap kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat local di Bintan

		masyarakat setempat. Dimana yang utama adalah tersingkirnya masyarakat karena kualitas SDM lokal tidak mampu bersaing dengan pendatang yang memiliki skill yang lebih tinggi.		
2	“Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Pantai Natsepa, Pulau Ambon.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pendapatan kelompok rumah tangga yaitu, jumlah anggota keluarga, tingkat pengeluaran, dan curahan waktu kerja. Berdasarkan tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang yaitu persentase sebesar 75%, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dengan persentase sebesar 22% dan yang terkecil yaitu tingkat kesejahteraan rendah dengan persentase sebesar 3%.	1. Terdapat persamaan baik dalam tema penelitian yaitu kontribusi pariwisata terhadap ekonomi warga 2. Terdapat persamaan dalam metodologi penelitian yaitu penelitian Kualitatif deskriptif.	1. Terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian. 2. Penelitian yang akan dilakukan lebih fokus terhadap kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat local di Bintan

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian di atas, dalam penelitian yang dilakukan ini bermaksud melakukan penelitian tentang “Dampak Kebijakan Pengembangan Pariwisata Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal di Bintan”. Penelitian yang akan dilakukan peneliti ini memiliki relevansi dengan penelitian ini terdahulu. Relevansi dimaksud yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang dampak kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh

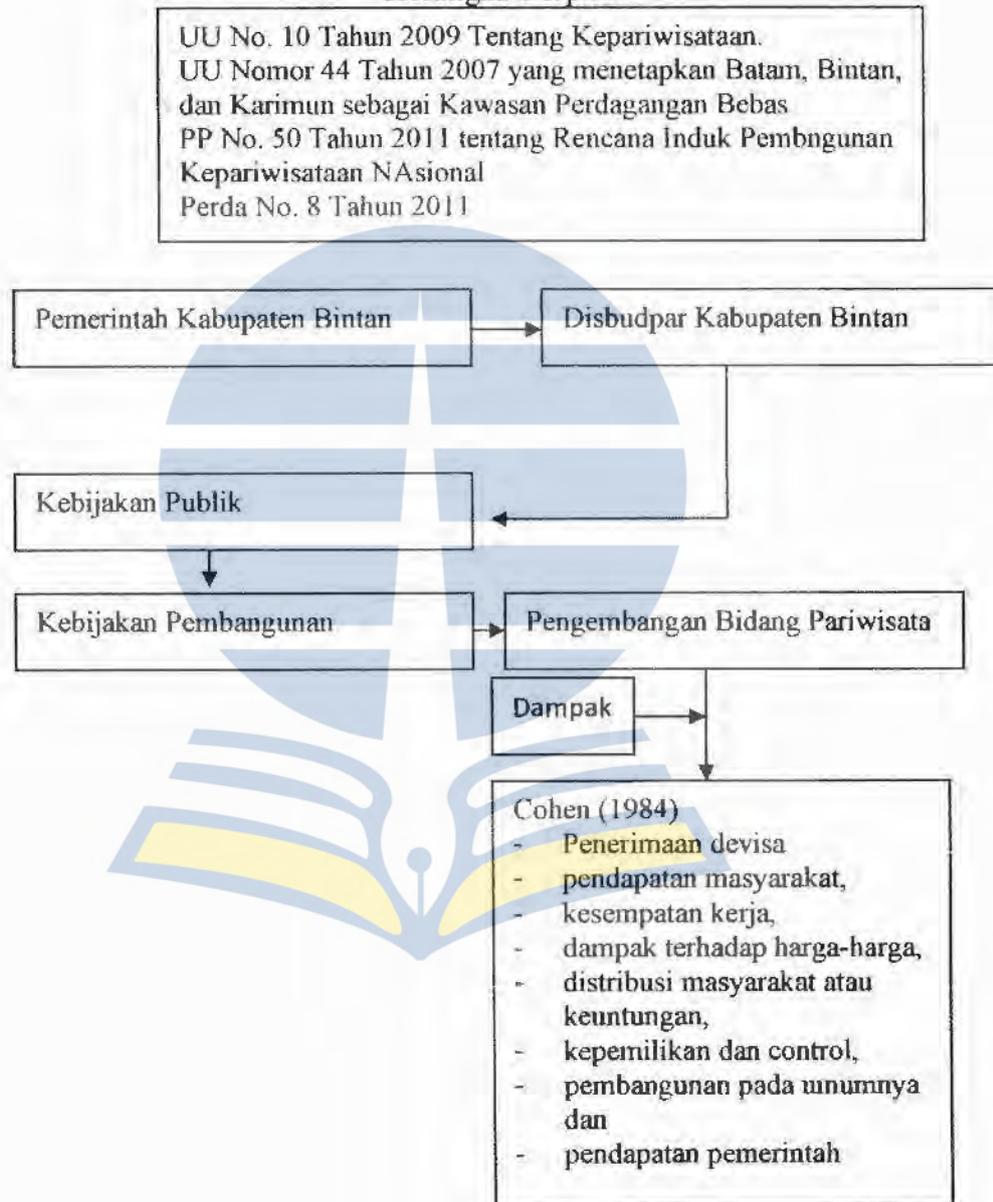
pemerintah daerah. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian terdahulu dari segi objek penelitian yang menjadi kajian. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti juga lebih fokus terhadap kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di Bintan.

C. Kerangka Berpikir

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka berpikir kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal di Bintan sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Nasution, penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif dan diperoleh dari situasi lapangan yang natural, atau sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test (Nasution, 2003:18).

Suparlan dalam Patilima mengungkapkan bahwa dalam pendekatan kualitatif tidak dikenal adanya sampel; tetapi peneliti harus melakukannya dengan teliti, mendalam, dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri (Patilima, 2007:3).

Pada pendekatan kualitatif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai pertanyaan penelitian bukan hanya mencakup: apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, tetapi yang terpenting harus mencakup pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa, menuntut jawaban mengenai hakekat yang ada dalam hubungan di antara gejala-gejala atau konsep, sedangkan pertanyaan apa, siapa, dimana dan kapan, menuntut jawaban mengenai

identitas, dan pertanyaan bagaimana, menuntut jawaban mengenai proses-prosesnya.

Sementara itu, untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang fenomena penelitian, penulis akan memakai pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa". Menurut Yin, pertanyaan tersebut pada dasarnya lebih eksplanatoris dan lebih mengarah ke penggunaan strategi-strategi studi kasus. Hal ini disebabkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini berkenaan dengan kaitan-kaitan operasional yang menuntut pelacakan waktu tersendiri, dan bukan sekedar frekuensi atau kemunculan semata (Yin, 2008:9).

Sementara itu, menurut Nawawi menyatakan penelitian yang deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Karena penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif maka yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (2001:3) jadi metodologi ini dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fenomena sosial yang diamati baik dengan observasi, wawancara maupun dokumentasi yang relevan.

Oleh karena itu, dalam penelitian yang akan dilakukan, metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian studi kasus yang

menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata dengan menyelidiki sikap dan atau perilaku pelaku yang terlibat pengembangan pariwisata sebagai upaya meningkatkan ekonomi warga di Bintan.

Menurut Yin, karakteristik dari penelitian dengan studi kasus yaitu (Yin, 2008:18): pertama, menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana: Kedua, batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana: Ketiga, multisumber bukti dimanfaatkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian studi kasus deskriptif ini berusaha mengamati dan meneliti suatu keadaan dalam suatu organisasi sesuai apa adanya (*natural*), lalu hasil dari penelitian tersebut berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dengan demikian kehadiran peneliti pada saat melakukan penelitian menjadi faktor penting. Kehadiran peneliti berperan sebagai partisipan penuh. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sepenuhnya diketahui oleh narasumber maupun informan sebagai peneliti.

3.2. Fokus penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada:

1. Melihat kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di Bintan.
2. Melihat faktor pendukung dan penghambat kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat lokal di Bintan.

3.3. Informan Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber (informan) yang diharapkan dapat memberikan informasi data sesuai dengan kebutuhan. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Bintan. Berdasarkan uraian tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, Camat, dan 3 orang masyarakat yang berada di wilayah industri pariwisata Bintan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan teknik wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan responden dalam rangka pengumpulan data yang lebih jelas dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*). Selain wawancara mendalam, jika tidak dimungkinkan, teknik wawancara juga dilakukan dengan wawancara bermedia. Sedangkan

data sekunder dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan berupa literatur.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen, serta observasi. Data wawancara dan observasi digunakan untuk mendapatkan data primer sedangkan data dokumen digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Berikut uraiannya:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan responden untuk suatu tujuan penelitian. Wawancara yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dan pendirian-pendiriannya. *Interview* atau wawancara langsung dilakukan dengan menggunakan panduan atau petunjuk wawancara (*Interview Guide*), berisi tentang garis-garis besar pokok yang akan ditanyakan, dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dengan cara bertatap muka langsung antara pewawancara dengan sumber informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin dan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan membawa kerangka

pertanyaan, tetapi penyajiannya tidak terikat oleh kerangka yang telah disiapkan.

Wawancara dilakukan dengan tiga pihak yaitu pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, Camat, dan Masyarakat.

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan diskusi terfokus dalam suatu kelompok. Dalam diskusi tersebut ditanyakan sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan interaktif, peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. Dalam FGD umumnya terdapat suatu topik yang dibahas dan didiskusikan bersama.

FGD dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas ekonomi di dalam dan sekitar kawasan wisata. Dalam FGD tersebut, peneliti dalam suatu FGD bertindak sebagai pemantik sekaligus moderator sebagai bahan dalam diskusi. Selanjutnya peserta diminta untuk menjawab dan memberikan tanggapan terhadap suatu kasus yang diberikan oleh peneliti. Peneliti dibantu oleh tim yang bertugas untuk mencatat atau membuat notulensi diskusi.

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangan hubungan

antar aspek dalam suatu fenomena. Observasi dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Observasi dihentikan pada saat terjadi kejenuhan informasi, yakni setelah tidak ada penambahan informasi baru pada fenomena yang diamati.

Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian secara langsung, dengan melihat lokasi pariwisata dan masyarakat yang berjualan dan atau melakukan aktifitas bisnis di dalam dan sekitar lokasi pariwisata. Observasi dilakukan oleh penulis dengan melakukan check list atas barang-barang atau aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh responden.

d. Dokumen

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti melakukannya dengan menyelidiki dokumen-dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan bahan-bahan dimana orang-orang menyatakan dengan katakata sendiri mengenai kehidupan atau diri mereka, seperti catatan-catatan harian, surat-surat dan riwayat hidup yang ditulis sendiri. Dokumen pribadi memberikan pandangan yang mendalam

mengenai hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa dari pandangan seseorang yang mengalaminya disertai dasar-dasar pikirannya.

Dokumen pribadi merupakan catatan atau karangan pribadi secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya yang ditunjukkan dalam bentuk buku harian, laporan kegiatan, surat pribadi dan autobiografi. Sedangkan dokumen-dokumen resmi merupakan dokumen-dokumen yang telah disahkan secara kelembagaan. Kegunaan dari dokumen pribadi adalah bahwa peneliti dapat memperoleh suatu pandangan dari dalam, melalui reaksi, tanggapan, interaksi dan penglihatan para warga mengenai masyarakat yang bersangkutan. Kecuali itu, dengan mempelajari data pengalaman individu dalam kehidupannya dalam masyarakat, si peneliti akan dapat memperdalam pengertian secara kualitatif mengenai detail yang tak akan dapat dicapai olehnya dengan metode observasi saja. Dokumen-dokumen ini terbagi dua yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa instruksi, peraturan-peraturan, risalah atau pelaporan rapat dan lain-lain untuk kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal dimanfaatkan untuk menelaah konteks social, berisikan bahan-bahan informasi oleh lembaga social, seperti majalah, buletin, pernyataan, berita yang disiarkan kepada media massa (Moleong, 2002:161-163).

Dokumen yang dibutuhkan di Pemda adalah jumlah PAD dari pariwisata dan yang lainnya, perencanaan pembangunan dan tugas-

tugas daripada dinas pariwisata. Sementara dari kecamatan dicari data tentang tugas-tugas kecamatan dalam melaksanakan kebijakan pariwisata. Data dari masyarakat yaitu berupa jumlah pedagang yang ada di dalam dan sekitar lokasi pariwisata, penghasilan mereka dan lain-lain.

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002:56).

Dari uraian di atas dapat digaris bawahi bahwa analisis data bermaksud mengorganisasikan data. Data terkumpul yang terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Selain dilihat dari segi tujuan penelitian bahwa analisis data dilakukan dalam suatu proses yang berarti bahwa pelaksanaannya sudah dimulai sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis data dan penafsirannya segera mungkin dilaksanakan jangan sampai data yang ada menjadi tidak terpakai atau lupa memberikan makna dari data tersebut.

Adapun data yang akan dianalisis berupa keterangan-keterangan maupun fenomena hasil observasi yang muncul di lapangan dan untuk dianalisis menjadi argumen kalimat yang logis dan sistematis. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menjelaskan langkah analisis

data dalam penelitian kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Adapun tahap-tahap teknik analisis data yang digunakan meliputi (Sugiyono, 2007:90):

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengubah data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar yang dimaksud disini adalah keterangan-keterangan atau informasi yang diuraikan informan tetapi tidak relevan dengan fokus masalah penelitian sehingga perlu direduksi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dibaca atau dipahami. Untuk lebih menjelaskan uraian maka dapat dibuat gambaran berupa diagram interaktif tentang fenomena yang terjadi.

c. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melibatkan hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Geografis Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 23 Februari 2006 (<http://www.bintantourism.com/about.php>, diakses pada 27 Januari 2018).

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2001, terhitung 17 Oktober 2001, Kota Administratif Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau dengan memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari.

Kabupaten Bintan terletak antara Derajat 00 Lintang Utara 1 Derajat 20 Lintang Selatan dan 104 Derajat 00 Bujur Timur 108 Derajat 30 Bujur Timur di sebelah Barat dan 108 derajat 12 menit 47 detik Bujur Timur di sebelah Barat dan 108 derajat 2 menit 27 detik Bujur Timur di

sebelah Timur. Luas wilayah daratan dan lautan mencapai 88.038,54 Km persegi dengan luas daratan 1.946,13 KM persegi (2,21 persen) dan luas lautan 86.092,41 Km persegi (97.79 persen).

Kabupaten Bintan merupakan salah satu pulau terbesar yang berada di gugusan Kepulauan Riau. Tanjung Pinang menjadi Ibukota provinsi daerah ini. Bintan sangat strategis karena dekat dengan Singapura. Posisi tersebut menjadikan Bintan berpotensi untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Bintan menjadi daerah yang terkenal dengan wisata olahraga bertaraf internasional. Bagi pecinta sport tourism, mungkin sudah tak asing mendengar Triathlon Ironman 70.3 Bintan, Tour De Bintan, Bintan Moon Run, ataupun wisata olahraga lainnya. Bintan Moon Run menjadi salah satu kompetisi yang ikut meramaikan pada 4 November 2017 di Kawasan Lagoi Bay, Bintan (<http://wisata.pesona.travel/content/detail/bintan-moon-run-promosikan-pariwisata-kepulauan-riau>, diakses pada 27 Januari 2018).

Bintan menempati urutan ke-4 menjadi tempat kunjungan wisatawan mancanegara setelah Bali, Batam, dan Lombok. Ditambah dengan diadakannya wisata olahraga (sport tourism) membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Bintan. Kepulauan Riau termasuk Bintan telah menyuplai 15% dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2016.

2. Gambaran Geografis Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri) diganti menjadi Kabupaten Bintan. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, tertanggal 23 Februari 2006 (<http://www.bintantourism.com/about.php>, diakses pada 27 Januari 2018).

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2001, terhitung 17 Oktober 2001, Kota Administratif Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau dengan memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari.

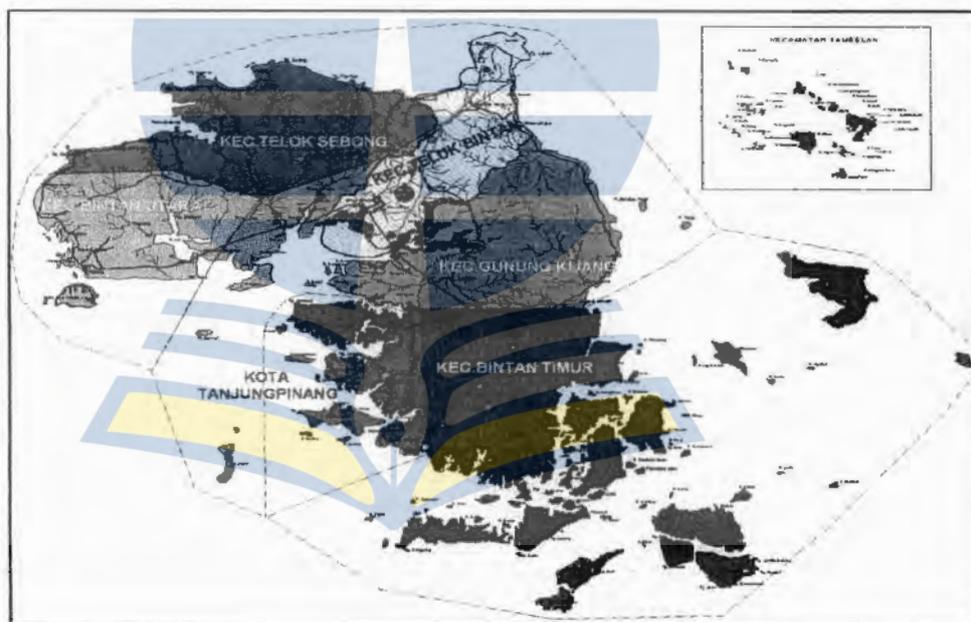
Kabupaten Bintan terletak antara Derajat 00 Lintang Utara 1 Derajat 20 Lintang Selatan dan 104 Derajat 00 Bujur Timur 108 Derajat 30 Bujur Timur di sebelah Barat dan 108 derajat 12 menit 47 detik Bujur Timur di sebelah Barat dan 108 derajat 2 menit 27 detik Bujur Timur di sebelah Timur. Luas wilayah daratan dan lautan mencapai 88.038,54 Km persegi dengan luas daratan 1.946,13 KM persegi (2,21 persen) dan luas lautan 86.092,41 Km persegi (97.79 persen).

Posisi geografis Kabupaten Bintan berbatasan dengan (<http://www.gosumatra.com/pulau-bintan-kepulauan-riau/>):

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Natuna
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kota Batam
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 4.1.

Peta Wilayah Kabupaten Bintan



Kabupaten Bintan memiliki 241 buah pulau, 49 pulau diantaranya sudah dihuni, 192 pulau kosong, 190 pulau bernama dan 12 pulau tidak bernama. Pulau yang tidak berpenghuni serta tidak bernama sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian khususnya usaha perkebunan.

Jumlah pulau yang sudah dihuni terbesar yaitu 21 pulau dan Tambelan sebanyak 20 pulau, bila dilihat dari persentase hunian pulau tertinggi di Kecamatan Teluk Bintan sebesar 71,42 % sedangkan yang terendah hunian pulaunya adalah Kecamatan Gunung Kijang dan Teluk Sebong. Pada tahun 2007 telah dilakukan pemekaran wilayah kecamatan menjadi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Kuala Sri Lobam, sampai dengan pembuatan profil kesehatan ini belum bias ditampilkan datanya dan masih bergabung dengan kecamatan induk yaitu Kecamatan Bintan Utara.

3. Visi dan Misi

Terwujudnya Bintan sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu misi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Destinasi Pariwisata Bintan yang aman, nyaman, menarik dan mudah dicapai berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan wilayah setempat;
- b. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Bintan yang terpadu, sinergi, efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Bintan;

- c. Mengembangkan Industri Pariwisata Bintang yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitrausahaan dan bertanggungjawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. Mengembangkan Kelembagaan Pariwisata (organisasi Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, serta Sumber daya manusia) yang efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan Bintang yang berkelanjutan;
- e. Mengembangkan Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif melalui event promosi wisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.

4. Deskripsi Data

a. Potensi yang Dimiliki Kabupaten Bintang

Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan dan Peternakan. Dibidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Misalnya Lagoi yang memiliki pemandangan laut dan pantai yang telah menarik minat lebih dari 40.000 wisatawan mancanegara. Dilahan seluas 23.000 ha terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 Resort dan 2 lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole.

Guna menarik minat investor, pemerintah setempat telah mengalokasikan lahan seluas 500 ha di Kijang dan 100 ha di Bintang

Barat sebagai areal hutan industri dan pengembangan pantai. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan bekerja sama dengan Singapura untuk membangun Bintan Utara.

Pada sektor industri, Kabupaten ini mempunyai kawasan industri di Lobam sebagai salah satu hasil dari kerjasama ekonomi antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Terdapat 4000 ha lahan yang dipakai oleh 18 perusahaan elektronik, 14 perusahaan garmen dan lain-lain.

Industri perikanan juga berperan penting di kabupaten ini dengan didukung oleh luas wilayah perairan seluas 95%. Para investor disarankan untuk mengembangkan sektor ini di wilayah timur, yaitu di wilayah Tambelan dengan 54 pulau. Wilayah ini cocok untuk perikanan dan budidaya terumbu karang seluas 117,480 ha. Pariwisata laut cocok untuk wilayah ini dengan didukung oleh pasir pantai yang bersih dan putih.

Pada sektor peternakan, Kabupaten Bintan merupakan daerah yang sangat potensial dalam pengembangan ternak sapi (jenis sapi Bali), kambing, babi, itik dan ayam (buras dan ras pedaging/petelur) sebagai penyuplai pasokan bahan pangan asal hewan di Kepulauan Riau, khususnya untuk daerah perkotaan seperti Kota Kijang, Kota Tanjung Uban dan Kota Tanjungpinang. Tercatat populasi ternak Sapi di Bintan hampir mendekati 1000 ekor pada tahun 2010, angka ini akan diupayakan untuk terus meningkat seiring dengan tingginya

permintaan daging dan permintaan sapi, khususnya sapi potong pada saat hari raya Idul Adha (Hari Raya Kurban). Ayam Buras: 199,383 ekor, Kambing: 900 ekor, Itik: 3.663 ekor, Babi: 3.500 ekor, Ayam Ras Petelur: 265.700 ekor dan Ayam Ras Pedaging: 2.499.700 ekor. Untuk menjaga kesehatan ternak, di Kabupaten Bintan terdapat 5 orang Dokter Hewan dan dibantu oleh beberapa paramedis veteriner dengan ditunjang oleh 2 buah sarana Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) yang berlokasi di Desa Sri Bintan dan Desa Ekan Aculai Kecamatan Teluk Sebong, selain Poskeswan, di Kabupaten Bintan juga terdapat Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang berlokasi di Kecamatan Bintan Utara.

b. Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata terhadap Pembangunan Kabupaten Bintan

Pemerintah memiliki peran sentral dalam membuat setiap kebijakan baik yang terkait langsung dengan kepentingan ekonomi daerah maupun tidak. Demikian juga dalam hal pembuatan kebijakan di bidang pariwisata. Kebijakan pariwisata saat ini menjadi sektor andalan daerah-daerah, terutama daerah yang memiliki keindahan alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, bahwa penyusunan kebijakan di bidang pariwisata dilakukan dengan terlebih dahulu

melakukan survei dan pemantauan terhadap daerah-daerah terpilih. Survei dan pemantauan tersebut diarahkan untuk menjadi bahan kajian pembuatan kebijakan sebagaimana disebutkan dalam wawancara berikut ini:

“penyusunan kebijakan dibuat berdasarkan hasil survei dan pantauan pemerintah dalam mengembangkan aspek-aspek pariwisata di daerah yang mempunyai potensi dalam bidang terotiral yang dapat membuat majunya suatu daerah dan sumber daya manusianya agar berkembang lebih dari salinan angka-angka potensi suatu daerah” (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bintan pada 17 April 2017, di Kantor Dinas).

Penyusunan kebijakan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan qq Dinas Kebudayaan dan pariwisata didasarkan pada pertimbangan untuk menarik investor bekerjasama dengan pemerintah dalam menggarap potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Selain itu, pertimbangan penyusunan kebijakan pariwisata juga dilakukan pada pertimbangan khusus yaitu karakteristik khusus yang dimiliki oleh calon daerah wisata sebagaimana disebutkan dalam petikan wawancara berikut ini:

“Pertimbangan selalu dibuat agar dapat mencapai hasil dari setiap kebijakan pariwisata yang ada di daerah atau tempat itu sendiri, menjadikan daerah yang selalu dilirik para investor dalam hal-hal pariwisata” (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bintan pada 17 April 2017, di Kantor Dinas).

Pemerintah dalam menggarap wilayah sebagai calon destinasi wisata tidak hanya bergerak sendiri, tetapi juga melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan sektor

pariwisata memiliki peran besar dalam memajukan industri pariwisata tersebut. hal tersebut disebabkan karena tanpa masyarakat, maka pemerintah akan kewalahan menyediakan sekian sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung industri pariwisata tersebut.

Oleh karena itu, menurut penuturan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa pelibatan masyarakat dalam menggarap dan mengembangkan sektor pariwisata yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah menginginkan dengan adanya industri pariwisata di daerah tertentu, maka masyarakat tersebut ikut bangkit dan mandiri.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam mengembangkan dan mendukung aktifitas industri pariwisata dimaksudkan untuk memberi daya tarik dari destinasi tersebut. Masyarakat sebagai pemilik kebudayaan dapat memanfaatkan destinasi pariwisata untuk membuat kreasi industri berbasis kebudayaan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata, sekaligus juga mempertahankan dan menjadi agen memperkenalkan budaya lokal kepada para turis yang datang ke Bintan.

“masyarakat wajib terlibat di dalam industri pariwisata di daerahnya yang berpotensi, selain menjadikan masyarakat yang mandiri dan memiliki budaya dari keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat setempat agar nilai jual potensi pariwisata berkembang sebagaimana mestinya perjalanan keterlibatan masyarakat itu sendiri” (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bintan pada 17 April 2017, di Kantor Dinas).

Pemerintah qq Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penggerak industri pariwisata memiliki tanggungjawab besar untuk mengkonsolidasi setiap elemen kekuatan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya objek wisata tersebut. Pemerintah bertanggungjawab untuk mendorong dan memenuhi keterampilan masyarakat sekitar sebagai penyangga hidup dan tumbuhnya aktifitas pariwisata tersebut.

“selain ada namanya sektor sumber daya manusia dan daerah itu sendiri sendiri yang diciptakan oleh masyarakat agar berpeluang di bidang pariwisata khususnya daerah yang berpotensi” (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bintan pada 17 April 2017, di Kantor Dinas).

Pemerintah sebagai penggerak sektor industri pariwisata, memiliki peran sentral dalam menggerakkan semua komponen agar memberikan sumbangsih terhadap kemajuan industri tersebut. Salah satunya yaitu dengan memberikan ruang bagi masyarakat agar memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Bintan.

Pemerintah memiliki peran dengan cara memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memberikan keterampilan yang dibutuhkan. Kebanyakan keterampilan yang disiapkan oleh pemerintah yaitu dari segi kebudayaan masyarakat sekitar. Kebudayaan dijadikan komoditas sebagai pendukung aktifitas pariwisata masyarakat yang datang ke Kabupaten Bintan.

“pemerintah selalu memberikan ruang dalam mendampingi masyarakatnya dalam bentuk budaya dan potensi daerah yang dikembangkan dari industri pariwisata itu sendiri agar menjadikan nilai jual terhadap wisatawan asing maupun wisatawan setempat” (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bintan pada 17 April 2017, di Kantor Dinas).

Industri pariwisata termasuk jenis industri yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah, swasta dan masyarakat adalah komponen wajib yang mendukung industri tersebut. Dengan demikian, industri pariwisata memberikan keuntungan kepada banyak pihak. Kepada pemerintah, industri pariwisata dapat menjadi pemasukan daerah (PAD). Demikian juga bagi masyarakat, secara otomatis akan memberikan dampak terhadap kondisi perekonomiannya.

“keterlibatan masyarakat tentunya harus menjadi pondasi utama industri pariwisata daerahnya agar selalu menjadi tolak ukur terhadap budaya atau daya saing dari luar daerah itu sendiri (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bintan pada 17 April 2017, di Kantor Dinas)..

Sementara itu, selain pemerintah Kabupaten langsung yang menganni pembangunan pariwisata, pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata juga melibatkan pemerintahan Kecamatan dan Desa. Kecamatan memiliki peran sentral di dalam mendorong masyarakat lokal untuk terlibat di dalam pengelolaan destinasi wisata.

Camat menjadi koordinator dalam mengembangkan industri pariwisata di wilayahnya. Dalam hal ini, ia menggerakkan semua komponen untuk memberikan sumbangsih dalam pengembangan

wilayah dan industri pendukung seperti dikemukakan dalam hasil wawancara di bawah ini:

“sebagai pimpinan di setiap daerah harus memberikan peran yang sangat bermanfaat bagi masyarakatnya agar industri pariwisata berkembang maju dan selalu dilirik investor, atas himbauan dan arahan untuk memberikan industri pariwisata” (Wawancara dengan Camat pada 17 April 2017, di Kantor).

Selain itu, camat selaku perwakilan pemerintah di tingkat kecamatan dalam memberikan direksi dalam mengembangkan industri pariwisata berperan dalam memberikan dorongan dan motivasi bagi masyarakat untuk menjadikan proyek industri pariwisata setara dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Bintan. Dalam hal ini Camat turun langsung menggerakkan sineua komponen di masyarakat.

“dorongan pemerintah dibuat memotivasi kegiatan industri pariwisata bagi masyarakat agar menjadi suatu percontohan di setiap daerah yang memiliki potensi pariwisata” (Wawancara dengan Camat pada 17 April 2017, di Kantor).

Peran camat tidak sampai di situ, tetapi juga memberikan bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu memberikan sumbangsing dalam proyek pengembangan pariwisata di Bintan. Menurut Camat, bahwa pihaknya turun langsung memberikan pendampingan kepada masyarakat agar terlibat dalam kegiatan pariwisata.

Keterlibatan masyarakat dengan memberikan sumbangsing dalam peran-peran kebudayaan diyakini dapat menjadi daya tarik pariwisata bagi turis. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat terus didorong dan diberikan peran dalam siklus pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Bintan khususnya.

“pemerintah selalu mendampingi masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan industri pariwisata agar ketertarikan masyarakat menjadi budaya yang dapat mendorong aktifitas industri di setiap daerah dengan potensinya masing-masing kawasan yang ada di Bintan” (Wawancara dengan Camat pada 17 April 2017, di Kantor).

Industri pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan qq Dinas Kebudayaan an Pariwisata melibatkan banyak pihak dalam perjalanannya. Jumlah masyarakat yang terlibat terus bertambah seiring dengan dibukanya destinasi pariwisata baru. Menurut Bapak Camat bahwa saat ini terdapat ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat yang terlibat dalam semua mata rantai industri pariwisata di Kabupaten Bintan.

Menurutnya, masyarakat sangat antusias untuk terlibat dalam memberikan sumbangsih terhadap industri pariwisata di Bintan. Inudstri pariwisata yang demikian, memberikan multiple efek bagi daerah. Selain bisa memberikan sumbangsih pada PAD, juga secara langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan meningkatkannya pendapatan masyarakat dari sektor keikutsertaannya dalam aktifitas industri pariwisata.

“dari hasil pemantauan data masyarakat yang terlibat sudah dalam angka ribuan bahkan puluhan ribu di karenakan antusias dari pemerintah dan masyarakat di dalam mengembangkan potensi daerah dan sumber daya manusianya sendiri” (Wawancara dengan Camat pada 17 April 2017, di Kantor).

Masyarakat lokal merupakan salah satu penopang dalam industri pariwisata di Kabupaten Bintan. Dalam mengembangkan industri pariwisata, tidak semua sarana dan prasarana bisa disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam memajukan industri pariwisata. Demikian juga dalam pengembangan, industri pariwisata di Kabupaten Bintan.

Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai pendukung kegiatan pariwisata. Keterlibatan masyarakat tersebut juga secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang dimaksud yaitu salah satunya adalah manfaat ekonomis. Banyak masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata baik sebagai pendukung maupun sebagai penggerak awal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar kawasan pariwisata, bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata pada umumnya dimulai sejak pertama kali destinasi wisata tersebut dibuka. Keterlibatan masyarakat tersebut diyakini menjadi modal di dalam memajukan pariwisata di daerah tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Keterlibatan saya sejak berdirinya industri pariwisata daerah yang dapat memajukan daerah itu sendiri” (Wawancara dengan Bu Deni pada 18 April 2017, di ruko)

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat bermacam-macam. Kegiatan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktifitas kepariwisataan, mulai dari travel atau angkutan/transportasi, usaha konveksi, makanan, dan camilan dan lain-lain. Bu Deni merupakan salah satu penduduk sekitar yang memanfaatkan objek wisata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Bu Deni mengembangkan usaha seni kerajinan. Seni kerajinan tersebut dibuat dari kayu. Kayu dibentuk menjadi jenis alat musik lokal yang dijajakan kepada turis yang berkunjung ke lokasi wisata. Selain seni kerajinan tersebut, ia juga menjual makanan, pakaian daerah, dan sejarah daerah yang dijual dalam bentuk buku. Ia salah satu penduduk lokal yang telah lama berjualan di lokasi wisata tersebut dan telah mendapat keuntungan yang berlipat-lipat sejak pertama kali ia berjualan di sekitar tempat wisata tersebut.

“Usaha saya menjalankan budaya seni kerajinan yang berbentuk alat musik. Ciri khas makanan, pakaian daerah, dan sejarah-sejarah daerah yang dikemas dalam bentuk buku” (Wawancara dengan Bu Deni pada 18 April 2017, di ruko)

Keadaan masyarakat di sekitar lokasi pariwisata tersebut pada awalnya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun seiring dengan adanya objek wisata, pelan-pelan keadaan ekonomi masyarakat mulai beranjak naik. Keadaan ekonomi masyarakat diakui Bu Deni berkembang pesat karena banyaknya turis yang datang dan menyaksikan keindahan alam.

“yang pastinya berkembang pesat dalam aspek kehidupan material maupun materi yang didapatkan dalam industri pariwisata daerah saya” (Wawancara dengan Bu Deni pada 18 April 2017, di ruko)

Pendapatan yang diperoleh dari kerajinan dan berjualan di sekitar lokasi pariwisata tersebut ia setiap hari memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000 hingga Rp 4.000.000 perhari. Pendapatan tersebut jauh lebih besar daripada sebelum adanya objek wisata.

“Pendapatan masyarakat dapat diukur dari majunya wisatawan yang datang berkunjung di setiap harinya. Berkisaran dari 500.000 ribu sampai dengan 4.000.000 an perhari dari hasil pengembangan industri pariwisata. Belum lagi dihitung bulanan yang mencapai angka puluhan bahkan ratusan juta rupiah dan masih pemantauan dikarenakan menggunakan sistem nilai mata uang asing” (Wawancara dengan Bu Deni pada 18 April 2017, di ruko)

Banyak masyarakat yang mengandalkan pembeli dari turis yang datang ke lokasi tersebut. Lokasi yang awalnya sepi pengunjung sekarang banyak yang datang. Karena pemerintah terus menerus

mengadakan event promosi pariwisata kepada dunia luar. Walaupun awalnya tempat tersebut sepi, tetapi saat ini semakin ramai dikunjungi oleh turis lokal maupun turis mancanegara yang berasal dari Singapura dan Malaysia.

B. Pembahasan

1. Dampak Kebijakan Pengembangan Pariwisata Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal di Bintan

Berdasarkan teori di atas, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan Cohen yang mengatakan ada delapan dampak industry pariwisata yaitu: 1) dampak terhadap penerimaan devisa, 2) dampak terhadap pendapatan masyarakat, 3) dampak terhadap kesempatan kerja, 4) dampak terhadap harga-harga, 5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan, 6) dampak terhadap kepemilikan dan control, 7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan 8) dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Berdasarkan teori di atas, penulis akan mengemukakan dampak daripada kebijakan pembangunan pariwisata oleh pemerintah Kabupaten Bintan terhadap ekonomi Bintan.

a. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Penerimaan Devisa

Secara umum, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keindahan alam dan kekayaan alam, serta keindahan budaya. Keindahan alam dan kekayaan alam, serta keindahan budaya tersebut

Kadt, 1979:11 (dalam Tashadi, Ed., 1994), bahwa keberadaan pariwisata mendatangkan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja yang berarti mengurangi jumlah pengangguran serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka.

Penggunaan Mata Uang Asing di Lagoi sudah terjadi sejak kawasan Lagoi ini dibuka yaitu sejak tahun 1990'an akhir dan awal tahun 2000. Adanya kerja sama Indonesia dan Singapura dalam pembangunan kawasan Wisata Lagoi membuat arus wisatawan asing yang berkunjung di Lagoi mayoritas berasal dari Singapura (Bintan Dalam Angka 2012). Dari 337.353 orang wisatawan yang datang ke Bintan, 108.737 orang wisatawan berasal dari Singapura.

Singapura merupakan salah satu Negara dunia yang menjadi gerbang masuk wisatawan mancanegara ke Lagoi. Dengan di Undangkannya UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang di dalamnya mewajibkan bahwa transaksi keuangan di Indonesia, begitu pula di kawasan Lagoi wajib menggunakan Rupiah. Penggunaan mata uang asing di Lagoi sudah terjadi sejak kawasan Lagoi dibuka. Keadaan Indonesia yang menggunakan kurs bebas dalam perdagangan valuta asing. Penyebabnya adalah fluktuasi mata uang rupiah sulit untuk digunakan. Money changer di kawasan Lagoi juga tidak memadai serta biaya sewa yang mahal menyebabkan fasilitas ini jumlahnya sedikit.

Selain itu banyak barang import yang digunakan dan dibeli dengan menggunakan dolar. FTZ di kawasan Bintan yang berlaku di Kabupaten Bintan yang hanya membebaskan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan dan/atau pembebasan pada barang baku/dasar produksi menyebabkan banyak perusahaan mengimport bahan baku operasional seperti bahan makanan, sayuran, dan lain-lain. Keuntungan ekonomi menggunakan dolar lebih menjanjikan dibanding menggunakan rupiah. Selain itu banyaknya transaksi elektronik digunakan wisatawan dalam bertransaksi pariwisata di kawasan wisata Lagoi.

Kemudian hal lain yang patut diperhatikan dan menjadi penyebab pengusaha menggunakan mata uang asing adalah banyak bahan-bahan pokok yang import dari luar negeri membuat pengusaha kawasan wisata menggunakan dolar sebagai alat tukar untuk membeli kebutuhan usaha. Ini terlihat pada data yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya, bahwa import di Kabupaten Bintan yang didominasi oleh barang jadi lebih besar pada tahun 2012 tercatat 2.106,701 juta US\$ di banding ekspor Kabupaten Bintan. Kondisi pertanian serta perikanan Kabupaten Bintan sendiri yang tidak mampu men-supply permintaan resort membuat import adalah jalan satu-satunya. Ini terlihat dalam laju pertumbuhan sektor Pertanian yang rendah yaitu hanya 6,44% pada 2013. Dan support distribusi PDRB Kabupaten

Bintan pada tahun 2013 hanya 5,69% (Sumber BPS Bintan, Tahun 2013).

Kabupaten Bintan sebagai kawasan FTZ/pelabuhan Bebas seharusnya dapat memberikan nilai plus dalam hal peningkatan iklim ekonomi di Bintan. Salah satu keuntungan adalah pembebasan atau pengembalian yang tidak terbatas untuk barang import bahan baku dasar produksi. Dalam hal ini pengusaha cukup diuntungkan dalam modal membuka usaha di Bintan. Pengelolaan nilai tukar yang realistis dan perubahan yang cukup rendah dapat memberikan kepastian dunia usaha sebagaimana yang terjadi pada beberapa waktu terakhir merupakan suatu hak yang penting dalam peningkatan investasi maupun kegiatan beorientasi pada ekspor. Nilai tukar yang melonjak-lonjak secara drastis tak terkendali akan menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya terutama bagi merek yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau menjual barangnya ke pasar ekspor (Pohan, 2008:55).

Penggunaan mata uang asing ini sebenarnya tidak hanya menguntungkan Pengusaha tetapi juga Pemerintah Kabupaten Bintan, melalui pajak daerah yang dibayarkan ke daerah dalam mata uang rupiah. Hanya saja perlu diperhatikan dengan banyaknya penggunaan mata uang asing di suatu negara dapat terjadi devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah harus tegas dalam implementasi penggunaan

rupiah dalam transaksi di Indonesia. penggunaan mata uang asing di suatu negara dapat memicu tekanan kepada nilai mata uang negara tersebut.

Dengan penggunaan rupiah secara mutlak di Indonesia secara tidak langsung dapat menguatkan nilai tukar mata uang rupiah. Jadi sebenarnya halhal yang menjadi alasan pengusaha bahwa nilai rupiah yang fluktuatif dan cenderung turun. Hanya dapat diatasi dengan penggunaan rupiah itu sendiri sebagai alat tukar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan yang sebagian besar diperoleh Kawasan Lagoi dari Pajak Hotel, Hiburan dan sebagainya Pembayaran pajak/retribusi daerah tetap menggunakan rupiah. Besaran pajak tersebut telah diatur dalam perda Kabupaten Bintan tentang pajak dan retribusi. Seperti, pada pajak Hotel menurut Perda pajak daerah adalah 10%. Jadi perhitungan pajaknya adalah tarif hotel misalkan US\$200/malam maka pengunjung wajib membayar US\$ 200 + 10%(US\$ 200). Jadi pajak yang harus dibayarkan ke daerah senilai US\$ 20 lalu di kurs dalam mata uang rupiah.

Dalam hal mendorong percepatan penggunaan mata uang rupiah di kawasan Lagoi, pemerintah Bintan sempat berencana untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah, pengusaha dan Bank Indonesia Kepulauan Riau tentang batas akhir penggunaan mata uang asing di kawasan Lagoi. Tetapi hal ini menurut Bank Indonesia Kepulauan Riau telah menyalahi aturan dikarenakan

Kebijakan tentang mata uang merupakan kebijakan moneter dan merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

Adanya pariwisata mendatangkan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja yang berarti mengurangi jumlah pengangguran serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka.

c. Dampak Pengembangan Pariwisata Bintan Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal

Dampak ekonomi politik pariwisata kawasan wisata lagoi terhadap pekerja dan upah, dengan beroperasinya kawasan Lagoi, masyarakat merasakan banyaknya terbuka lapangan pekerja. Hanya saja sebagian besar posisi penting di perusahaan didominasi oleh pekerja asing. Selain itu Dinas Tenaga Kerja sendiri tidak mempunyai data pasti berapa jumlah penduduk Bintan yang bekerja di Lagoi. Untuk saat ini belum ada konflik kekerasan antara pekerja asing dan pekerja lokal. Mengenai UMK Bintan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kawasan Lagoi merupakan salah satu daerah *survey* Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Bintan. mengenai upah tersebut masih ada peran kepentingan pekerja dan pengusaha. Sampai saat ini belum pernah terjadi penanguhan kenaikan UMK di kawasan Lagoi. Salah satu persoalan

yang ada di Kawasan lagoi mengenai upah hanya di Hotel Nirwana Gardens yaitu mengenai upah sundulan.

Community social responsibility (CSR) kawasan Lagoi masih di koordinasi oleh PT. BRC selaku pengelola kawasan Lagoi melalui program. Hanya ada beberapa perusahaan saja yang mengelola CSR perusahaan sendiri. Tetapi secara program CSR perusahaan tersebut masih tetap menyumbang ke PT. BRC. CSR diberikan ke masyarakat melalui program Kewirausahaan, Pendidikan, dan sosial.

Perlu diingat bukan hanya dampak positif saja dengan adanya Kawasan Lagoi, adapula dampak Negatif yang dirasakan masyarakat. Hal ini berkairan dengan pembebebsan lahan di Kawasam Lagoi yang dulu merupakan tanah hak milik rakyat. Harga ganti rugi yang tidak sesuai membuat masalah ini berlarut-larut sampai sekarang. Selain itu Pemerintah sendiri tidak ada langkah penyelesaian. Untuk data warga yang masih belum diganti rugi juga tidak ada data yang jelas. Dari data BPN Kabupaten Bintan hanya 16.003,17 ha yang memiliki Hak Guna Bangunan dari 23.000 ha yang diklaim PT. BRC dan PT. BMW sebagai Kawasan wisata Terpadu Lagoi. Dengan adanya data ini jelas masih ada hampir 7000 ha tanah yang masih belum jelas kepemilikannya, dan kemungkinan itu adalah milik penduduk.

Berdasarkan uraian di atas, seiring dengan bergeliatnya kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan, maka berdasarkan penelitian diketahui bahwa kegiatan pariwisata memiliki dampak terbadap kondisi

ekonomi masyarakat sekitar. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata khususnya perlu memperhatikan kondisi daerah serta faktor fisik dan nonfisik. Hal ini untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berlebihan, oleh karena itu mengembangkan kawasan wisata hendaknya memperhatikan prinsip pengembangan yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal.

Pengembangan berwawasan adalah pengembangan pariwisata yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi masyarakat setempat, dengan kata lain pengembangan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan budaya. Berdasarkan pendapat Pitana dan Gayatri (2005:109) bahwa pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat membawa berbagai dampak. Kegiatan pariwisata memiliki dampak terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata, yaitu: dampak terhadap sosial ekonomi, dampak terhadap sosial budaya dan dampak terhadap lingkungan fisik. Dampak pariwisata adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap lingkungan hidup sebelum adanya kegiatan pariwisata dan setelah adanya kegiatan pariwisata baik langsung maupun tidak langsung yang berupa dampak fisik dan non fisik.

Dampak kegiatan pariwisata terhadap ekonomi yaitu suatu aktivitas/kegiatan terhadap kondisi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan serta produktifitas masyarakat (Suharto 1993:135).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keadaan masyarakat di sekitar lokasi pariwisata tersebut pada awalnya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun seiring dengan adanya objek wisata, pelan-pelan keadaan ekonomi masyarakat mulai beranjak naik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat terus membaik seiring dengan banyaknya turis yang datang dan menyaksikan keindahan alam.

Dari hasil berjualan di spot-spot sekitar pariwisata, diakui ada peningkatan penghasilan dari semula hanya Rp. 500.000 perhari menjadi Rp 4.000.000 perhari setelah adanya pembangunan destinasi pariwisata. Pendapatan tersebut jauh lebih besar daripada sebelum adanya objek wisata.

Selain itu, banyak juga yang memiliki pekerjaan baru, dari sebelumnya tidak bekerja kemudian bekerja di sekitar lokasi pariwisata. Beberapa lokasi pariwisata saat ini menjadi ramai seiring dengan banyaknya even yang dihelat oleh pemerintah untuk memberikan hiburan tambahan bagi turis. Walaupun awalnya tempat tersebut sepi, tetapi saat ini semakin ramai dikunjungi oleh turis lokal maupun turis mancanegara yang berasal dari Singapura dan Malaysia.

d. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kesempatan Kerja

Proses perencanaan dan pelatihan kerja merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan

kebijaksanaan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Perencanaan memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan yaitu :

- 1) Pelayanan administrasi pemerintah.
- 2) Pengembangan nilai budaya.
- 3) Pengelolaan kekayaan budaya.
- 4) Pengelolaan keragaman budaya.
- 5) Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
- 6) Pengembangan kemitraan.
- 7) Pengembangan destinasi pariwisata.
- 8) Pengembangan pemasaran pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya dalam meningkatkan perencanaan dan pelatihan kerja yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik dan menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam melakukan perencanaan dan pelatihan kerja. Inilah yang masih diupayakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melakukan perencanaan dan pelatihan, serta sosialisasi agar kawasan wisata yang ada dikelola sesuai dengan tujuannya. Citra yang baik dari suatu kawasan wisata akan mendorong berkembangnya kawasan tersebut. Semakin baik citra suatu kawasan wisata akan semakin cepat mengembangkan kawasan

wisata. Kegiatan pariwisata baru berhasil apabila terjadi kerja sama saling mendukung dan memerlukan.

Promosi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan upaya pemasaran. Promosi pariwisata harus dilaksanakan secara selaras dan terpadu, baik didalam maupun di luar negeri. Promosi atau pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang, dan mendapatkan laba. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut juga bergantung pada keahliannya dalam bidang promosi atau pemasaran, dibidang produksi, keuangan, dan bidang-bidang yang lainnya.

Pariwisata juga memerlukan promosi atau pemasaran agar kawasan wisata tersebut dapat dimanfaatkan segala sumber dayanya untuk kepentingan bersama. Pariwisata sangat berhubungan dengan promosi, karena dengan mempromosikan kawasan wisata yang ada, wisatawan dapat dengan mudah mengetahui dan mempertimbangkan untuk melakukan wisata ke kawasan wisata tersebut. Tentu saja dengan berbagai macam keunggulan yang berbeda disetiap kawasan wisatanya. Dengan meningkatkan pengenalan akan Desa Wisata Setulang tesebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan citra kawasan wisata yang terbaik dimata wisatawan dan pengunjung.

Dengan demikian, dampak pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Bintan bagi masyarakat adalah menghasilkan manfaat ekonomi yang besar baik bagi Negara tuan rumah, maupun Negara asal para turis. Salah satu motivasi utama sebuah Negara mempromosikan dirinya sebagai Negara dengan tujuan wisata adalah timbul kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi Negara-negara berkembang. Bersamaan dengan dampak lainnya, peningkatan ekonomi yang begitu pesat juga terjadi dengan berbagai keuntungan dan kerugian.

Dampak besar kebijakan pariwisata yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu dengan meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat sekitar dilibatkan dalam menggarap dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Masyarakat dapat menjalankan aktifitas bisnis dengan memanfaatkan kedatangan turis ke lokasi-lokasi wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat jauh berkembang daripada sebelum dan setelah adanya objek wisata. Kabupaten Bintan yang awalnya adalah wilayah mati, kemudian dikembangkan oleh pemerintah guna mendukung aktifitas perekonomian masyarakat. Hasilnya, berdasarkan pengakuan masyarakat sekitar bahwa dampak dari adanya objek wisata tersebut,

masyarakat bias mendapatkan penghasilan Rp 500.000 sampai dengan 4.000.000 sehari.

Pendapatan tersebut diperoleh dengan cara berjualan berbagai macam kerajinan dan makanan khas Kabupaten Bintan. Masyarakat antusias untuk menyediakan semua kebutuhan yang ada di lokasi wisata sebagai bagian dari industry pariwisata. Dengan adanya dukungan baik dari segi pengikutsertaan masyarakat dalam manajemen objek wisata, maupun dengan cara menyediakan kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi wisata, dapat menambah penghasilan bagi masyarakat. Industri pariwisata dengan demikian, tidak hanya mendatangkan retribusi bagi daerah, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan.

Kegiatan pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan yaitu:

- 1) Membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata sebagai penyedia sarana dan prasarana prasarana kegiatan pariwisata pendukung.
- 2) Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang juga secara langsung dan tidak langsung bisa dipergunakan oleh penduduk lokal pula. Seperti : tempat rekreasi, mall, dan lain-lain.
- 3) Mendapatkan devisa (*national balance payment*) melalui pertukaran mata uang asing (*foreign exchange*).

- 4) Mendorong seseorang untuk berwiraswasta / wirausaha, contoh : pedagang kerajinan, penyewaan papan selancar, pemasok bahan makanan dan bunga ke hotel, dan lain-lain
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan pemerintah.
- 6) Memberikan keuntungan ekonomi kepada hotel dan restaurant. Contohnya, wisatawan yang pergi berwisata bersama keluarganya memerlukan kamar yang besar dan makanan yang lebih banyak. Dampak ekonomi tidak langsung dapat dirasakan oleh pedagang-pedagang di pasar karena permintaan terhadap barang/bahan makanan akan bertambah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata di Bintan tersebut membuka peluang kesempatan kerja kepada masyarakat local. Pengembangan pariwisata membuka sector-sektor ekonomi yang mati atau tidak berkembang.

e. Dampak Pariwisata terhadap Pembangunan dan Pemasukan Daerah Kabupaten Bintan

Austriana (2005) mengatakan bahwa semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Pariwisata sebagai entitas industry yang menjadi kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, akan memperbesar pendapatan dari

sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah juga akan semakin meningkat.

Di Bintan, salah satu potensinya adalah IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing). Dalam hal ini Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pembayaran izin perpanjangan IMTA sebesar US\$ 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per orang per bulan. Dan pada ayat (2) disebutkan pembayaran Perpanjangan IMTA harus dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran retribusi oleh Wajib retribusi. Pembayaran IMTA di Kabupaten Bintan dapat dibayarkan pada BPMPD (Badan Perizinan modal dan Promosi Daerah). Untuk Tahun 2013 Pekerja asing yang membayar perpanjangan IMTA sebanyak 99 orang (Data BPMPD Tahun 2013). Jelas ini menjadi salah satu potensi PAD Bintan selain dari pajak Daerah Kabupaten Bintan yang berasal dari kawasan pariwisata. Demi menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten sangat konsern sekali dalam menata Pariwisata di Kabupaten Bintan salah satu dengan membuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bintan. dalam Perencanaan ini dibahas latar belakang, analisis situasi pariwisata Bintan, Isu strategis,

Pendekatan pembangunan kepariwisataan, visi, misi, tujuan dan sasaran, target yang ingin dicapai serta rencana kerja. Dalam hal ini Kabupaten Bintan masih dalam dari RIPPARDA Kabupaten Bintan yang kemudian akan diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

Banyaknya jumlah wisatawan yang mendatangi objek-objek wisata di Kepulauan Riau tersebut mencerminkan geliat pariwisata yang sangat menggembirakan. Wisatawan asing yang berkunjung ke Propinsi Kepri paling banyak melalui Batam sebagai pintu masuk dengan menyumbang hampir 70 % (1.219.608 orang) diikuti oleh Lagoi (Bintan), Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang (Wibowo, 2014).

Sejak tahun 2008, Bintan telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus yang diikuti dengan pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan dengan Nomor : Kpts / 04 / DK / VIII / 2008 tanggal 23 Agustus 2008. Kemajuan sarana dan prasarana khususnya di bidang perhubungan baik udara, darat maupun laut, akan membawa dampak yang sangat besar dalam menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan Kawasan Bintan Wilayah Kab. Bintan terutama di sektor pariwisata, industri, perikanan serta perdagangan dan jasa.

Keberadaan infrastruktur yang baik, maka hubungan antar daerah akan mudah dan lancar terutama dalam hal pendistribusian penyediaan

kebutuhan pokok masyarakat dan pemasaran hasil produksi baik untuk dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor, dimana hal ini akan membawa dampak positif bagi pengembangan Kawasan Bintan Wilayah Kab. Bintan.

Selain dari pajak daerah, potensi pariwisata di Kabupaten Bintan bagi PAD Kabupaten Bintan didapat dari retribusi daerah. Salah satu potensinya adalah IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing). Dalam hal ini Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pembayaran izin perpanjangan IMTA sebesar US\$ 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per orang per bulan. Dan pada ayat (2) disebutkan pembayarkan Perpanjangan IMTA harus dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran retribusi oleh Wajib retribusi.

Pembayaran IMTA di Kabupaten Bintan dapat dibayarkan pada BPMPD (Badan Perizinan modal dan Promosi Daerah). Untuk Tahun 2013 Pekerja asing yang membayar perpanjangan IMTA sebanyak 99 orang (Data BPMPD Tahun 2013). Jelas ini menjadi salah satu potensi PAD Bintan selain dari pajak Daerah Kabupaten Bintan yang berasal dari kawasan pariwisata. Demi menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten sangat konsern sekali dalam menata Pariwisata di Kabupaten Bintan salah satu dengan membuat

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bintan. dalam Perencanaan ini dibahas latar belakang, analisis situasi pariwisata Bintan, Isu strategis, Pendekatan pembangunan kepariwisataan, visi, misi, tujuan dan sasaran, target yang ingin dicapai serta rencana kerja. Dalam hal ini Kabupaten Bintan masih dalam dari RIPPARDA Kabupaten Bintan yang kemudian akan diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.

Struktur perekonomian Kabupaten Bintan ditopang oleh sektor kegiatan pariwisata dan industri pengolahan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan investasi sampai sekarang, peran investasi di Kawasan FTZ Bintan dirasakan masih belum meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah secara optimal. Oleh karena itu untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan investasi, di samping tersedianya sarana dan prasarana, baik potensi sumber daya alam yang ada dan letak kawasan yang sangat strategis, perlu adanya kerjasama antar instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan itu sendiri.

Peningkatan nilai realisasi investasi yang disampaikan oleh perusahaan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan harapan yang saling membantu dan mendukung bagi perkembangan dan pertumbuhan pendapatan di daerah. Salah satu kebijakan yang sedang digalangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan manajerial maupun teknologi dan tenaga kerja melalui proses ahli teknologi

perusahaan PMA serta terciptanya kesempatan usaha dan kesempatan kerja baru guna mengatasi gejolak sosial seperti pengangguran. Salah satu partisipasi dari investor PMA seperti data grafik diatas, dimana nilai investasi semakin meningkat, tentunya dengan peningkatan investasi akan terserap tenaga kerja yang lebih banyak, yang berakibat pada berkurangnya angka pengangguran.

Di Kabupaten Bintan sendiri untuk pembangunan pariwisata dikembangkan dua Konsep pembangunan yaitu Kawasan Lagoi dengan pariwisata untuk kelas menengah ke atas. Dan kawasan Pantai Timur Bintan (Berakit Trikora-Kawal) pembangunan pariwisata kemasyarakatan untuk mengakomodir wisatawan kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu, untuk Perusahaan yang akan beroperasi di Kabupaten Bintan wajib menaati Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selain membagi pembangunan kawasan pariwisata di Kabupaten Bintan dengan segmentasi pengunjung. Pembangunan kawasan Pariwisata di Kawasan Bintan maupun bangunan lainnya di Kabupaten Bintan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Bintan 2011-2031 dan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Kabupaten Bintan sendiri telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031. Dalam Perda berisi rencana pembangunan Bintan secara fisik selama 20 tahun sejak peraturan ini di undangkan yaitu dari tahun 2011 hingga 2031.

Kawasan Lagoi merupakan salah satu kawasan Strategis Kabupaten Bintan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031. Kawasan Strategis Kabupaten Bintan adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Bintan terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Pembiayaan Kawasan Strategis Kabupaten Bintan menurut pasal 42 ayat bahwa pembiayaan pengembangan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bintan serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (*swasta/investor*) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dana lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan).

f. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kepemilikan dan Kontrol

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di Kabupaten Bintan dikembangkan dua Konsep pembangunan yaitu Kawasan Lagoi dengan pariwisata untuk kelas menengah ke atas. Dan kawasan Pantai Timur Bintan (Berakit-Trikora-Kawal) pembangunan pariwisata kemasyarakatan untuk mengakomodir wisatawan kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu, untuk Perusahaan yang akan beroperasi di Kabupaten Bintan wajib menaati Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pembangunan kawasan Pariwisata di Kawasan Bintan maupun bangunan lainnya di Kabupaten Bintan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Bintan 2011-2031 dan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Kabupaten Bintan sendiri telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011- 2031. Dalam Perda berisi rencana pembangunan Bintan secara fisik selama 20 tahun sejak peraturan ini di undangkan yaitu dari tahun 2011 hingga 2031. kawasan Lagoi merupakan salah satu kawasan Strategis Kabupaten Bintan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031.

Kawasan Strategis Kabupaten Bintan adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Bintan terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Pembiayaan Kawasan Strategis Kabupaten Bintan menurut pasal 42 ayat (3) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bintan serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (*swasta/investor*) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun antara swasta/*investor* dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dana lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian pembangunan bandara khusus di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam yang disebutkan pada pasal 15 merupakan salah satu pembangunan fasilitas pendukung bagi pariwisata salah satunya pariwisata kawasan Lagoi.

Dilihat dari pembiayaan pembangunan pariwisata di Lagoi, seperti jalan, air dan Listrik dibangun oleh PT. BRC selaku pemegang hak pengelola kawasan Lagoi. Dalam hal ini, kawasan Lagoi murni di kelola oleh PT. BRC tidak ada campur tangan Pemerintah dalam hal

pembangunan maupun rencana pembangunan di kawasan Lagoi. Di karenakan PT. BRC telah mendapat hak khusus pengelolaan kawasan Lagoi seluas 23.000 ha. Untuk pengelolaan lahan dilakukan oleh PT. BMW (Buana Mega Wisata).

Perusahaan ini masih 1 Grup dengan PT. BRC. Selain itu perusahaan yang bergerak di kawasan Lagoi juga merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan hanya sebagian kecil yang swasta atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peluang pariwisata di Kabupaten Bintan yang sangat banyak, serta kebijakan pembangunan yang telah dilakukan Kabupaten Bintan untuk mendorong memaksimalkan potensi pariwisata, untuk memaksimalkan PAD bintang maka Kabupaten Bintan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam Perda ini memuat objek Pajak mana saja yang menjadi domain Pemerintah Kabupaten bintang. selain itu juga memuat besaran pajak yang ditentukan untuk tiap jenis pajak daerah. Selain dari pajak daerah, potensi pariwisata di Kabupaten Bintan bagi PAD Kabupaten Bintan didapat dari retribusi daerah.

g. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Pembangunan pada Umumnya

Kemudian pembangunan bandara khusus di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam yang disebutkan pada pasal 15 merupakan salah satu pembangunan fasilitas pendukung bagi pariwisata

salah satunya pariwisata kawasan Lagoi. Dilihat dari pembiayaan pembangunan pariwisata di Lagoi, seperti jalan, air dan Listrik dibangun oleh PT. BRC selaku pemegang hak pengelola kawasan Lagoi. Dalam hal ini, kawasan Lagoi murni di kelola oleh PT. BRC tidak ada campur tangan Pemerintah dalam hal pembangunan maupun rencana pembangunan di kawasan Lagoi. Di karenakan PT. BRC telah mendapat hak khusus pengelolaan kawasan Lagoi seluas 23.000 ha.

Untuk pengelolahan lahan dilakukan oleh PT. BMW (Buana Mega Wisata). Perusahaan ini masih 1 Grup dengan PT. BRC. Selain itu perusahaan yang bergerak di kawasan Lagoi juga merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan hanya sebagian kecil yang swasta atau Penanaman Modan Dalam Negeri (PMDN). Peluang pariwisata di Kabupaten Bintan yang sangat banyak, serta kebijakan pembangunan yang telah dilakukan Kabupaten Bintan untuk mendorong memaksimalkan potensi pariwisata, untuk memaksimalkan PAD bintan maka Kabupaten Bintan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Oleh karena itu dengan adanya penetapan Kabupaten Bintan sebagai daerah kawasan ekonomi khusus, maka hal ini berdampak pada peningkatan investasi terutama di bidang pariwisata.

Selain membuat kawasan wisata dengan target kelas menengah atas, pemerintah juga membangun kawasan kawasan Pantai Timur Bintan (Berakit-Trikora-Kawal) pembangunan pariwisata

kemasyarakatan untuk mengakomodir wisatawan kelas menengah ke bawah. Oleh sebab itu, untuk Perusahaan yang akan beroperasi di Kabupaten Bintan wajib menaati Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Ibu Dian Erfanita menerangkan secara singkat bahwa Perusahaan Pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Bintan, dengan Luas Lahan Lebih dari 1 ha, wajib mengurus, yaitu:

- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal (Modal lebih dari Lima Ratus Juta Rupiah)
- 2) Izin Lokasi (di BPN)
- 3) Izin Gangguan atau HO (gangguan sosial dan gangguan lingkungan)
- 4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 6) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (sebelumnya perusahaan harus mengurus AMDAL di BLH Kabupaten Bintan, dan mendapat izin)
- 7) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Selain membagi pembangunan kawasan pariwisata di Kabupaten Bintan dengan segmentasi pengunjung. Pembangunan kawasan Pariwisata di Kawasan Bintan maupun bangunan lainnya di Kabupaten Bintan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Bintan 2011-2031 dan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bintan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Kabupaten Bintan sendiri telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031. Dalam Perda berisi rencana pembangunan Bintan secara fisik selama 20 tahun sejak peraturan ini di undangkan yaitu dari tahun 2011 hingga 2031. kawasan Lagoi merupakan salah satu kawasan Strategis Kabupaten Bintan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031. Kawasan Strategis Kabupaten Bintan adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Bintan terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Pembiayaan Kawasan Strategis Kabupaten Bintan menurut pasal 42 ayat (3) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bintan serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (*swasta/investor*) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dana lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pembangunan bandara khusus di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam yang disebutkan pada pasal 15 merupakan salah satu pembangunan fasilitas pendukung bagi pariwisata salah satunya pariwisata kawasan Lagoi. Dilihat dari pembiayaan pembangunan pariwisata di Lagoi, seperti jalan, air dan Listrik dibangun oleh PT. BRC selaku pemegang hak pengelola kawasan Lagoi. Dalam hal ini, kawasan Lagoi murni di kelola oleh PT. BRC tidak ada campur tangan Pemerintah dalam hal pembangunan maupun rencana pembangunan di kawasan Lagoi. Di karenakan PT. BRC telah mendapat hak khusus pengelolaan kawasan Lagoi seluas 23.000 ha. Untuk pengelolahan lahan dilakukan oleh PT. BMW (Buana Mega Wisata). Perusahaan ini masih 1 Grup dengan PT. BRC.

Selain itu perusahaan yang bergerak di kawasan Lagoi juga merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan hanya sebagian kecil yang swasta atau Penanaman Modan Dalam Negeri (PMDN). Peluang pariwisata di Kabupaten Bintan yang sangat banyak, serta kebijakan pembangunan yang telah dilakukan Kabupaten Bintan untuk mendorong memaksimalkan potensi pariwisata, untuk memaksimalkan PAD bintang maka Kabupaten Bintan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam Perda ini memuat objek Pajak mana saja yang menjadi domain Pemerintah Kabupaten bintang. selain itu juga memuat besaran pajak yang ditentukan untuk tiap jenis pajak daerah.

Adanya pariwisata mendatangkan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja yang berarti mengurangi jumlah pengangguran serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Lokal Di Bintan

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengembangkan industri pariwisata tidak terlepas dari adanya dukungan dari berbagai elemen yaitu swasta dan masyarakat sekitar. Swasta membantu pendanaan awal pengembangan sector pariwisata serta menyediakan manajemen selama kurun waktu tertentu. Swasta berperan dalam mengembangkan sektor pariwisata pada hampir semua objek wisata yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bintan saat ini.

Selain swasta, keterlibatan masyarakat dalam manajemen, juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung membuat objek pariwisata menjadi semarak. Masyarakat berperan dalam menyediakan kebutuhan mulai dari makan, minum, dan akomodasi wisatawan selama berwisata. Keterlibatan masyarakat tersebut memudahkan bagi wisatawan untuk

menjalani kegiatan berwisatanya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri atas keberadaan objek wisata.

Dengan demikian, faktor pendukung dalam penyusunan kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Bintan adalah dukungan dari masyarakat yang mendukung adanya pengembangan bagi kawasan wisata menjadi kawasan yang layak menjadi wisata wisata wujud dari dukungan tersebut seperti dalam pembenahan kawasan wisata di Kabupaten Bintan, dimana ada beberapa rumah penduduk di sekitar laman adat yang harus dipindahkan, masyarakat yang rumahnya dipindahkan setuju dan menyambut baik dalam pemindahan rumah mereka ke kawasan yang disediakan oleh pemerintah. Dan dimana di sekitar laman adat tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai kawasan taman yang dekat dengan laman adat dan didirikan beberapa pendopo-pendopo kecil tempat untuk wisatawan bersantai dan beristirahat.

Masyarakat juga bersedia menyewakan alat transportasi bagi wisatawan apabila transportasi yang disediakan pemerintah kurang, masyarakat di Kabupaten Bintan juga menjadikan rumah mereka sebagai *home stay* dengan kreatifitas dari masyarakat dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan kawasan wisata Kabupaten Bintan tersebut memiliki hubungan yang baik dan saling mendukung bagi kelangsungan dan pengembangan dalam Kabupaten Bintan

tersebut. Dalam pengembangan harus ada dukungan yang tinggi dari masyarakat setempat demi peningkatan dalam mengembangkan Kabupaten Bintan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor dukungan dari berbagai stakeholder, kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menemui hambatan. Adapun faktor penghambat dihadapi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Demikian juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dalam menjalankan perannya dalam mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Bintan selalu ada faktor penghambat yang terjadi. Apabila masyarakat kurang sadar tentang pentingnya pengembangan dalam kawasan wisata di Kabupaten Bintan maka pengembangan kawasan wisata ini tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, masalah berikutnya adalah anggaran dana yang ada belum mencukupi sehingga belum dapat melakukan pengembangan secara maksimal, selain itu persaingan dengan kawasan wisata yang lain yang ada di Kabupaten Bintan juga dapat menjadi penghambat karena kawasan wisata di Kabupaten Bintan memiliki objek wisata yang berbeda dan memiliki daya tariknya yang berbeda pula.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan tentang kebijakan pengembangan pariwisata sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori Cohen tentang dampak industri pariwisata sebagaimana dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yaitu: Kebijakan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Bintan dilakukan secara terencana oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kebijakan dilakukan sejak tahun 2008 dengan adanya keputusan Gubernur Kepri tentang posisi Bintan sebagai salah satu wilayah prioritas untuk dikembangkan. Usaha pemerintah tersebut yaitu: melakukan perencanaan dan pelatihan kerja, perencanaan dan pelatihan kerja ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di setiap wilayah sekitar destinasi wisata yang mana pemerintah sendiri telah mengikut sertakan masyarakat dalam menjalankan perencanaan yang disusun oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk beberapa dari masyarakat sekitar sendiri. Usaha pemerintah tersebut membuahkan hasil dalam hal meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, melalui pemberdayaan masyarakat, membina masyarakat agar dapat memiliki ciri

khas dan memelihara keasrian kawasan wisata dan memperkenalkan produk buatan tangan masyarakat Bintang sendiri.

2. Faktor penghambat dari mengembangkan kawasan wisata Kabupaten Bintang ini adalah, anggaran dana yang terkadang belum mencukupi upaya pemerintah Kabupaten Bintang dan masyarakat untuk mereka melakukan kegiatan secara langsung. Hal tersebut juga menjadi sebab masih berjalan dan secara bertahap. Faktor pendukung dalam mengembangkan kawasan wisata di Kabupaten Bintang adalah adanya dukungan yang tinggi dari masyarakat untuk menjadikan kawasan wisata yang mampu bersaing dengan kawasan wisata lainnya, bekerjasama dalam membangun infrastruktur dan akomodasi demi berkembangnya kawasan wisata Kabupaten Bintang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah seperti Dinas Perkerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Kepolisian sehingga dalam Mengembangkan Kawasan Wisata yang ada di Kabupaten Bintang agar ada mekanisme kerja yang konfrehensip dalam mengembangkan kawasan industri pariwisata.

2. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih dan mengambil manfaat dari siklus industri pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan. Dalam hal ini, penulis menyarankan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat setempat untuk membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Austriana, Ida. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor. Pariwisata", Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2005.
- Bogdan, R. Tailor dan J, Steven, *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*, Surabaya, Usaha Nasional, 1993
- Cohen, Erik. *The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Finding*. California: Annual Review of Sociology, Vol. 10. 1984.
- Heni Ari Putranti, "Dampak Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pantai Lagoi Oleh Investor Asing Terhadap Masyarakat Setempat Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau" Tugas Akhir Undip Semarang, 2002.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010.
- Lilian Sarah dan Wildom Sahunilawance "Dampak Pariwisata Terhadap Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Pelaku Usaha Di Kawasan Wisata Pantai Natsepa, Pulau Ambon".
- Lundberg, E Donald., Stavenga, Mink H., dan Krishnamoorthy, M. *Ekonomi Pariwisata*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1997.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cetakan pertama, Yogyakarta, Gajah Mada University Press Nawawi, 1994.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, cetakan ulang ketiga, Bandung, PT Tarsito, 2003.
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut S., 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G., 2005. *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta : Andi Offset.
- P Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan kedua, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2007.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Kuraiko Pratama Bandung, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, 1999.
- Suharto, Edi (2003), "Paradigma Baru Studi Kemiskinan" dalam Media Indonesia, 10 September
- Sari, S. Ratih, 2004., *Peranan Pariwisata Dalam Pembangunan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Sukarsa, I Made., *Pengantar Pariwisata. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia Timur*. Denpasar. 1999.
- Soekadijo, RG. 2000. *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata sebagai System*. Lingkage. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suratmo, F., Gunarwan, 2007. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumihardjo.T, *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Penerbit Fokusmedia, 2008.
- Spillane, J James. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta, 1994.
- Toni Ari Wibowo, *Perkembangan Pariwisata Batam (Masyarakat Vs Pengusaha) Perkembangan Pariwisata Batam (Masyarakat Vs Pengusaha)*, dimuat pada Tribun Batam, tahun 2014.
- Sumiharjo, 2008, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.1 | 191.
- Tarigan, R., *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, Bumi. Aksara, Jakarta, 2007.
- Tashadi, Ed., 1994. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdiknas.
- Tribe, J., *The Economics of Rereation, Leisure and Tourism* (4th ed.). Oxford. : Elsevier. UNWTO, 2011.
- Yin, Robert K, *Case Study Research Design and Methods*. Mudzakir, Djuzi (penterjemah). *Studi Kasus Desain dan Metode*, Edisi Pertama, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011
- <http://travel.kompas.com/read/2015/01/19/131900327/Di.Bintan.Kawasan.Wisata.Dilarang.Gunakan.Dollar>, diakses pada 12 Oktober 2017, pukul 21.00 WIB
- “Bintan Moon Run Promosikan Pariwisata Kepulauan Riau”, <http://wisata.pesona.travel/content/detail/bintan-moon-run-promosikan-pariwisata-kepulauan-riau>